



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang anggaran dan realisasi entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasiannya ekuitas.

Laporan Arus/Aliran Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran, informasi tersebut memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,



Laporan Arus Kas, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja Keuangan Daerah, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, laporan arus kas, penjelasan per pos disatukan pada neraca dan laporan arus/aliran kas yang terkait, sedangkan untuk kinerja keuangan daerah atau kinerja pemerintah daerah dilaporkan tersendiri dan merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun Neraca Awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan Neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan Laporan Keuangan tahun-tahun berikutnya. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat. Selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2013 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan dikonsolidasi menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Neraca Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember Tahun 2014 yang kami sajikan ini telah diaudit (*audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum menyusun laporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- m. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- n. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31a Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi;
- o. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



- p. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- q. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan.

**BAB II****KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1. Ekonomi Makro**

Kondisi ekonomi Kota Probolinggo selama tiga tahun terakhir (tahun 2011, 2012 dan 2013) dapat diketahui dari buku Data Statistik Kota Probolinggo Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo. Indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode tersebut, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB Kota Probolinggo merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah Kota Probolinggo, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada wilayah Kota Probolinggo.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deviator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Angka PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu tiga tahun terakhir masing – masing adalah Rp5,267 triliun (2011), Rp5,893 triliun (2012) dan Rp6,675 triliun (2013). Angka PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 selama tahun tiga tahun terakhir masing-masing Rp2,155 triliun (2011), Rp2,303 triliun (2012) dan Rp2,460 triliun (2013).

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Probolinggo dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing – masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Pada tahun 2013, sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restaurant mencapai 45,88%, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan andil sebesar 13,64%, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 13,13%. Sektor lainnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah sektor jasa – jasa 11,88%. Adapun sumbangan lima sektor lainnya masih kurang dari 10%, dengan penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalan hampir 0%.

Seluruh sektor ekonomi pada tahun 2013 mencatat pertumbuhan positif kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan. Pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah, maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor konstruksi sebesar 13,09%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing – masing sebesar 8,15%; sektor industri pengolahan sebesar 7,86%; sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,34%;



sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 4,94% dan sektor jasa – jasa sebesar 3,49%. Sementara sektor pertanian mengalami penurunan sebesar minus 0,86% dan sektor pertambangan dan penggalian minus 3,80%.

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan adalah langkah - langkah atau tindakan - tindakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 meliputi kebijakan umum Pendapatan, kebijakan umum Belanja dan kebijakan umum Pembiayaan.

Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dimana struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

1). Kebijakan Umum Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah. Pendapatan Asli Daerah utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana perimbangan kenaikan yang terjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo tahun 2014 pada sisi Pendapatan adalah optimalisasi dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah memberikan inspirasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menarik investor dan pelaku ekonomi masuk di Kota Probolinggo melalui pelayanan yang cepat dan efisien.

Upaya untuk merealisasikan target pendapatan asli daerah pada tahun 2014 dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam implementasi di Pemerintah Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah;

- a. Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- b. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.



- c. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- d. Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan dengan melakukan upaya yang lebih serius untuk memungut pajak dan retribusi yang ada dengan meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang maksimal dan debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu upaya tersebut misalnya dalam pembayaran pajak reklame dimana masyarakat diberikan kejelasan dalam membayar pajak dan kejelasan struktur tarif, disamping itu upaya yang dilakukan adalah dengan menertibkan reklame - reklame liar yang tujuannya memberikan kejelasan kepada masyarakat antara hak dan kewajibannya.

Adanya pekan panutan pembayaran PBB yang setiap tahun dilaksanakan oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan tujuan memberikan contoh dan tauladan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo dalam pelunasan PBB.

Ekstensifikasi pendapatan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dengan upaya peningkatan dibidang investasi daerah, dengan mengupayakan peningkatan kepercayaan para investor baik dari daerah, luar daerah maupun dari luar negeri. Investasi daerah tersebut meliputi antara lain investasi di bidang industri, transportasi, perikanan maupun pariwisata.

Terkait dengan pajak dan retribusi Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan retribusi untuk menjaring obyek baru.

2). Kebijakan Umum Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja terdiri dari belanja urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka Kebijakan Umum Belanja Kota Probolinggo tahun 2014 adalah sebagai berikut :

2.1) Belanja Penyelenggaraan Urusan Wajib

Belanja penyelenggaraan urusan wajib merupakan belanja yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui peningkatan prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. kependudukan dan catatan sipil;
- j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- l. sosial;
- m. ketenagakerjaan;
- n. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- o. penanaman modal;
- p. kebudayaan;
- q. kepemudaan dan olah raga;
- r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- s. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- t. ketahanan pangan;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. komunikasi dan informatika; dan
- y. perpustakaan.

2.2) Belanja Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Belanja penyelenggaraan urusan pilihan merupakan belanja yang arahkan untuk mendukung pencapaian prioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.



2.3) Klasifikasi dan Pengelompokan Belanja

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi tingkat SKPD pada Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari 42 SKPD dengan rincian 13 dinas, 7 badan, 3 kantor, 8 bagian di lingkungan sekretariat daerah, 1 Inspektorat Kota, 1 KDH dan Wakil KDH, 1 DPRD, 1 Sekretariat DPRD, 1 RSUD, 5 kecamatan dan 1 Sekretariat KORPRI.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan organisasi SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan.

Belanja daerah baik yang digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pilihan, dikelompokkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3). Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

1). Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut:



No.	Pendapatan	Target 2014	Realisasi 2014	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	101.459.544.753,37	135.062.805.887,61	133,12
2.	Pendapatan Transfer	677.759.271.080,00	683.362.100.310,00	100,83
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	54.384.708.000,00	54.390.858.000,00	100,01
	Jumlah	833.603.523.833,37	872.815.764.197,61	104,70

Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 secara umum mencapai 104,76% dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 sebesar Rp135.062.805.887,61 atau sebesar 133,12% dari seluruh target PAD. Tercapainya target PAD ini berkat kinerja dari seluruh instansi penghasil di jajaran Pemerintah Kota Probolinggo melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2014.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target 2014	Realisasi 2014	%
1.	Pajak Daerah	20.546.500.000,00	24.457.670.693,00	119,04
2.	Retribusi Daerah	11.786.169.350,00	15.330.543.060,00	130,07
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	762.559.815,47	762.559.815,47	100,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	68.364.315.587,90	94.512.032.319,14	138,25
	Jumlah	101.459.544.753,37	135.062.805.887,61	133,12

Dari keseluruhan komponen PAD realisasinya melebihi dari target yang ditentukan, antara lain Pajak Daerah tercapai sebesar 119,04%, Retribusi Daerah tercapai sebesar 130,07%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 100,00% dan Lain-lain PAD yang Sah tercapai sebesar 138,25%. Kontribusi capaian realisasi pajak daerah dari yang terbesar adalah PPI, BPHTB dan Pajak Restoran. Kontribusi capaian realisasi retribusi daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah kontribusi terbesar berasal dari pendapatan BLUD RSUD dr. Moh. Saleh dan penerimaan bunga deposito.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2014 terealisasi sebesar Rp683.362.100.310,00 atau 100,83% dari target yang ditetapkan.



Rincian target dan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2014 adalah, sebagai berikut:

No.	Pendapatan Transfer	Target 2014	Realisasi 2014	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	532.402.904.335,00	532.707.444.981,00	100,06
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	86.059.278.000,00	86.059.278.000,00	100,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	59.297.088.745,00	64.595.377.329,00	108,94
	Jumlah	677.759.271.080,00	683.362.100.310,00	100,83

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan transfer Tunjangan Profesi Guru PNSD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015. Sedangkan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2014 terealisasi sebesar Rp54.390.858.000,00 atau 100,01% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan Dana Insentif Daerah.

Rincian target dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah, adalah sebagai berikut:

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target 2014	Realisasi 2014	%
1	Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi)	32.441.347.000,00	32.447.497.000,00	100,01
2	Dana Insentif Daerah	21.943.361.000,00	21.943.361.000,00	100,00
	Jumlah	54.384.708.000,00	54.390.858.000,00	100,01

Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi) merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Dana Insentif Daerah adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Pemerintah Kota Probolinggo telah mendapatkan dana ini pada tahun 2013 dan 2014.

2). Anggaran Dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja daerah untuk tahun 2014 sebesar Rp907.766.807.435,83, dengan rincian sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)
1.	Belanja tidak langsung	439.272.063.891,76
2.	Belanja langsung	468.494.743.544,07
	Total	907.766.807.435,83

Dari anggaran tersebut pada tahun 2014 direalisasikan belanja daerah sebesar Rp778.254.103.607,97 atau 85,73% dari seluruh anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1.	Belanja tidak langsung	357.419.858.576,00
2.	Belanja langsung	420.834.245.031,97
	Total	778.254.103.607,97

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp357.419.858.576,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%
1.	Belanja Pegawai	396.907.489.418,76	339.315.809.262,00	85,49
2.	Belanja Hibah	29.652.250.000,00	12.223.966.000,00	41,22
3.	Belanja Bantuan Sosial	7.544.500.000,00	4.205.450.000,00	55,74
4.	Belanja Bantuan Keuangan	667.824.473,00	643.396.802,00	96,34
5.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	1.031.236.512,00	22,92
	Jumlah	439.272.063.891,76	357.419.858.576,00	81,37

- Belanja pegawai;

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp339.315.809.262,00 atau 85,49% tersebut merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Penganggaran belanja, termasuk belanja pegawai berdasarkan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.



- **Belanja Hibah;**
Realisasi belanja hibah sebesar Rp12.223.966.000,00 atau 41,22% digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Probolinggo yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pemberian hibah berupa barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada SKPD terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kota Probolinggo.
- **Belanja Bantuan Sosial;**
Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp4.205.450.000,00 atau 55,74% digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada anggota/kelompok masyarakat di wilayah administrasi Pemerintah Kota Probolinggo yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial, diberikan secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Pemberian bantuan sosial berupa barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada SKPD terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kota Probolinggo.
- **Belanja Bantuan Keuangan;**
Realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp643.396.802,00 atau 96,34% digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Probolinggo yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2013. Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan pada Tahun Anggaran 2014 sebanyak 8 (delapan) partai politik. Penganggaran belanja dan realisasinya untuk tahap I selama 8 (delapan) bulan, dari bulan Januari s.d. Agustus 2014 berdasarkan pada hasil pemilu legislatif 2009 yang masa baktinya berakhir pada bulan Agustus 2014. Sedangkan untuk tahap II selama 4 (empat) bulan, dari bulan September s.d. Desember 2014 berdasarkan pada hasil pemilu legislatif 2014. Namun demikian, bantuan keuangan tahap II Tahun Anggaran 2014 PPP tidak dapat dicairkan karena terjadi dualisme kepengurusan.
- **Belanja Tidak Terduga;**
Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014, penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/84/KEP/425.012/2014



tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Yang Dianggarkan Dalam APBD Untuk Mendanai Kebutuhan Mendesak Dalam Rangka Pembayaran Obat Pasien Jamkesmas RSUD Dr. Mohammad Saleh Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dan Nomor : 188.45/555/KEP/425.012/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Yang Dianggarkan Dalam APBD Untuk Mendanai Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam Dan/Atau Bencana Sosial, Termasuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun – Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dimaksud telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Probolinggo sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Pimpinan DPRD Kota Probolinggo Nomor : 900/579/425.110/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp1.031.236.512,00 atau 22,92% digunakan untuk pembayaran obat pasien Jamkesmas RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp2.500.000,00 digunakan untuk penanganan dapur rumah roboh di Curahgrinting. Selain itu juga digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan sebesar Rp28.736.512,00. Penerimaan tersebut adalah pembayaran PBB atas nama PG Wonolangan yang seharusnya masuk ke Rekening Kas Negara. Pengembalian atas kelebihan penerimaan dilaksanakan dengan pemindah bukuan yang seharusnya melalui mekanisme SP2D. Sehingga dibuat jurnal memorial untuk mencatat dan mengakui pengeluarannya melalui Belanja Tidak Terduga, berdasarkan:

- Nota kredit Bank Jatim No. 044 Set PBB 301213 tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp42.801.106,00. Dari jumlah tersebut seharusnya sebesar Rp28.736.512,00 merupakan pembayaran PBB atas nama PG Wonolangan, karena terjadi kesalahan transaksi masuk ke RKUD Kota Probolinggo yang seharusnya masuk ke rekening Kas Negara.
- Rekening koran Kas Umum Daerah Kota Probolinggo per 30 Desember 2013 atas diterimanya set PBB 301213 sebesar Rp42.801.106,00.
- Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo Nomor : 900/9156/425.110/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Pembayaran PBB atas Nama PG Wonolangan.
- Surat Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo Nomor : 052/54/PN/Cpb/2014 tanggal 8 Januari 2014 Perihal : Koreksi Kesalahan transaksi pembayaran PBB.
- Nota debit Bank Jatim No. 013 koreksi PBB PG Wonolangan 2013 tanggal 9 Januari 2014, sebesar Rp28.736.512,00.

b. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung sebesar Rp420.834.245.031,97 dapat dirinci sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Belanja	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%
1.	Belanja Pegawai	75.885.794.692,64	83.299.897.199,00	109,77
2.	Belanja Barang dan Jasa	251.277.128.679,38	230.610.989.994,25	91,78
3.	Belanja Modal	141.331.820.172,05	106.923.357.838,72	75,65
	Jumlah	468.494.743.544,07	420.834.245.031,97	89,83

- Belanja pegawai;
Realisasi belanja pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung sebesar Rp83.299.897.199,00 atau 109,77% adalah untuk pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS dan Uang Lembur.
- Belanja Barang dan Jasa;
Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp230.610.989.994,25 atau 91,78% digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu juga untuk pengeluaran uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud mencakup belanja pakai habis kantor, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, peralatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, pemeliharaan, jasa konsultan, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS serta belanja jasa tenaga kerja/buruh non pegawai.
- Belanja Modal;
Realisasi belanja modal sebesar Rp106.923.357.838,72 atau 75,65% digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Realisasi belanja modal tersebut untuk pengadaan tanah, alat – alat berat, alat – alat angkutan bermotor, alat – alat angkutan tidak bermotor, alat bengkel, alat – alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, mebelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat – alat studio, alat – alat komunikasi, alat – alat ukur, alat – alat kedokteran, alat – alat laboratorium, konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan, buku/kepuustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, alat – alat persenjataan/keamanan, sarana



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

perhubungan, peralatan pelatihan, peralatan pemancar, alat musik dan olahraga serta *software*.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Surat Edaran Mendagri Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 dan SE Mendagri Nomor 900/079/BAKD Tahun 2008 serta secara bertahap mengarah secara penuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah. Menimbang bahwa Peraturan Walikota Probolinggo tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, maka Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan kembali sistem dan kebijakan akuntansi sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31a Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi.

Beberapa pokok Kebijakan Akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain sebagai berikut:

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasi, yaitu merupakan kombinasi "Basis Kas" untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan "Basis Akrua" untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.



Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah :

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- b. Belanja diakui pada saat pengeluaran dan/atau pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D, baik SP2D-LS, SP2D-GU, maupun SP2D GU-Nihil.
- c. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
- d. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- e. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- f. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Probolinggo;
- g. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Dalam menyusun Laporan Keuangan, apabila pada periode sebelumnya terdapat kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi serta kesalahan interpretasi fakta, maka atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2014, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dengan beberapa tambahan kode rekening sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dan diperlukan di Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam hal ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3.4. Kebijakan Akuntansi atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana

3.4.1. ASET

ASET LANCAR

- a. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan;
- b. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 1. diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
 2. atau kas dan setara kas.

Kas dan setara kas

- a. Yang dimaksud kas adalah kas tunai dan saldo bank yang merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas meliputi deposito berjangka sampai dengan 3 bulan dan instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- c. Nilai kas dalam valuta asing, harus dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- d. Kas Pemerintah Kota Probolinggo terdiri atas kas di Kas Daerah yang tersimpan dalam rekening giro Bank Jatim, Kas di RSUD Kota Probolinggo, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham dapat dilakukan dalam bentuk deposito berjangka di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- c. Pengakuan dan penilaian pada saat diterima atau dikeluarkan, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai nominal uang.
- d. Investasi jangka pendek dapat dilakukan pula dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek yaitu tiga



sampai dengan duabelas bulan, dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan investasi meliputi:

- Harga transaksi investasi;
- Komisi perantara jual beli;
- Jasa bank; dan
- Biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan 'Piutang' dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan;
- d. Penilaian Piutang berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan metode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul – betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).
- f. Terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan eks pelimpahan dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota tersebut, adalah:
 - Untuk mengatur dan menetapkan ketentuan atas pengakuan, pengukuran, penetapan, cara menghitung umur piutang, metode penghitungan penyisihan piutang dan menetapkan *net realizable value* (NRV), serta penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo atas Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan maupun setelah Pelimpahan;
 - Menjelaskan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait azas keberadaan dan ketepatan nominal jumlah piutang PBB Perkotaan; dan



- Mengatur pelaksanaan, penghapusan Piutang PBB Perkotaan dengan penjelasan mekanisme, persyaratan dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan.

Adapun ruang lingkup Peraturan Walikota tersebut, adalah:

- Pengelolaan atas Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan;
- Pengelolaan atas Piutang PBB Perkotaan setelah sepenuhnya dikelola dan menjadi hak dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah;
- Pengakuan, pengukuran dan penyajian atas biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan;
- Penatausahaan Piutang PBB Perkotaan dan biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran; dan
- Prosedur pemutakhiran/validasi dan penghapusan Piutang PBB Perkotaan.

Persediaan

- Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, persediaan bibit/benih tanaman, persediaan benih/bibit ikan, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.
- Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.
- Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan:
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

ASET NON LANCAR

- Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung dan atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk layanan publik;
- Aset non lancar terdiri dari Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Investasi Jangka Panjang

- Investasi Jangka Panjang merupakan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.



- b) Investasi Non-permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan hanya akan dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya.
- c) Investasi Permanen, adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang;
- d) Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari;
 - Penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D, Lembaga Keuangan Daerah, Badan Internasional dan Badan Usaha Lainnya yang bukan milik daerah;
 - Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Keuangan Daerah dan pihak lain yang diteruspinjamkan;
 - Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan Pengakuan Investasi Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan harga perolehan; yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 - Investasi Jangka Panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan;
- e) Investasi dalam saham BUMN/D yang dijual/ditukar dengan aset yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata – rata;
- f) Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi Energi Industri dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.
- g) Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal saham pada PDAM dan PT. Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2014 PT. UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.
- h) Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi Energi Industri dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.



Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset/aset lainnya;
- c) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- e) Aset tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan Mesin
 - Alat -alat Berat
 - Alat -alat Angkutan
 - Alat Bengkel
 - Alat Pertanian dan Peternakan
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Alat Studio dan Alat Komunikasi
 - Alat Ukur
 - Alat Kedokteran
 - Alat Laboratorium
 - Alat Keamanan
 - 3) Gedung dan Bangunan
 - Bangunan Gedung
 - Bangunan Monumen
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Jalan dan Jembatan
 - Bangunan Air (Irigasi)
 - Instalasi
 - Jaringan
 - 5) Aset Tetap Lainnya :
 - Buku-buku/ Buku Perpustakaan
 - Barang bercorak seni dan budaya
 - Hewan Ternak dan Tanaman
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan



- f) Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi).
- g) Terhadap Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh, tetapi termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya), sesuai dengan prinsip *substance over form* (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai kontraknya, sedangkan sisanya yaitu termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek;
- h) Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
- i) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset yang bersangkutan;
- j) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- k) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatkan efisiensi, dan/atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- l) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset dan menambah biaya penggantian pada harga aset tetap yang bersangkutan;
- m) Rincian Belanja Modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/aset yang pelaksanaannya dilakukan secara Kontrak (bukan swakelola) adalah:
 - Biaya Perencanaan teknis;
 - Biaya Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Biaya Konstruksi;
 - Biaya lainnya sampai dengan aset/aset tersebut dapat difungsikan.
- o) Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- p) Atribusi biaya administrasi dan umum yang terkait langsung pengadaan aset tetap dalam hal pengadaan lebih dari satu aset tetap,



dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang material.

- q) Batas dan besaran belanja/biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) dari pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut:

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

1. Peralatan dan Mesin

- Alat-Alat Besar Darat	≥ 10.000.000
- Alat-Alat Besar Apung	≥ 10.000.000
- Alat-Alat Bantu	≥ 500.000
- Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 2.000.000
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	≥ 500.000
- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	≥ 1.500.000
- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	≥ 500.000
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	≥ 10.000.000
- Alat Bengkel Bermesin	≥ 250.000
- Alat Bengkel Tidak Bermesin	≥ 100.000
- Alat Ukur	≥ 100.000

2. Alat Pertanian

- Alat Pengolahan	≥ 200.000
- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	≥ 200.000

3. Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat Kantor	≥ 300.000
- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	≥ 300.000
- Komputer	≥ 500.000
- Meja dan Kursi/rapat pejabat	≥ 500.000

4. Alat Studio dan Komunikasi

- Alat Studio	≥ 1.000.000
- Alat Komunikasi	≥ 500.000
- Peralatan Pemancar	≥ 1.500.000

5. Alat Kedokteran

- Alat Kedokteran	≥ 500.000
- Alat Kesehatan	≥ 500.000

6. Alat Laboratorium

- Unit Laboratorium	≥ 500.000
- Alat Peraga/Praktek Sekolah	≥ 250.000
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000
- Alat Laboratorium Hidrodinamika	≥ 500.000

**7. Alat Persenjataan dan Keamanan**

- Senjata api	≥ 1.500.000
- Persenjataan non Senjata Api	≥ 250.000
- Amunisi	≥ 250.000
- Senjata Sinar	≥ 500.000

8. Bangunan dan Gedung

- Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥10.000.000
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥10.000.000
- Bangunan Menara	≥ 5.000.000

9. Monumen

- Bangunan Bersejarah	≥10.000.000
- Tugu Peringatan	≥10.000.000
- Candi	≥10.000.000
- Taman (untuk Umum)	≥10.000.000
- Rambu-rambu	≥ 500.000
- Rambu-Rambu Lalu lintas udara	≥ 5.000.000

10. Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi

- Jalan	≥ 10.000.000
- Jembatan	≥10.000.000
- Bangunan Air dan Irigasi	≥10.000.000
- Instalasi Air Minum	≥ 5.000.000
- Instalasi Air Kotor/Limbah & sejenisnya	≥10.000.000
- Instalasi Listrik (pembangkit & sejenisnya)	≥10.000.000
- Instalasi Penangkal Petir	≥ 1.000.000
- Jaringan Air minum dan sejenisnya	≥10.000.000
- Jaringan Listrik dan Sejenisnya	≥ 2.500.000
- Jaringan Telepon dan Sejenisnya	≥ 500.000

11. Aset Tetap Lainnya

- Buku	≥ 50.000
- Terbitan Berkala	≥ 100.000
- Barang Perpustakaan	≥ 75.000
- Barang Bercorak Kebudayaan	≥ 200.000
- Alat Olah Raga Lainnya	≥ 250.000
- Hewan (Ternak dan Peliharaan)	≥ 500.000
- Tanaman	≥ 250.000

Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi**1. Peralatan dan Mesin**

Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat dan pemasangan alat/sparepart baru :

- Alat-Alat Besar Darat	≥ 5.000.000
- Alat-Alat Besar Apung	≥ 5.000.000



- Alat Angkutan Darat Bermotor $\geq 1.000.000$
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara $\geq 5.000.000$

2. Bangunan dan Gedung

Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis :

- Bangunan Gedung Tempat Kerja $\geq 5.000.000$
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal $\geq 5.000.000$
- Bangunan Menara $\geq 2.500.000$

3. Monumen

Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis :

- Bangunan Bersejarah $\geq 5.000.000$
- Tugu Peringatan $\geq 5.000.000$
- Candi $\geq 5.000.000$
- Taman (untuk umum) $\geq 5.000.000$

4. Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi

Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis :

- Jalan $\geq 10.000.000$
- Jembatan $\geq 20.000.000$
- Bangunan Air dan Irigasi $\geq 5.000.000$
- Instalasi Air Minum $\geq 2.500.000$
- Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya $\geq 5.000.000$
- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) $\geq 5.000.000$

- r) Hal – hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan Aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai Aset tetap;
- s) Penghapusan Aset tetap dilakukan jika Aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan Aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- t) Bangunan Dalam Pengerjaan
 - 1) Bangunan Dalam Pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
 - 2) Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.
- u) Penyusutan
 - 1) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk



masing – masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

- 2) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 3) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 4) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 5) Kebijakan tentang penyusutan aset tetap ini akan diterapkan setelah dilakukan inventarisasi menyeluruh (sensus) atas aset milik Pemerintah Kota Probolinggo atau selama – lamanya tahun 2015.

Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan yang dibentuk/ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b) Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- c) Pengakuan ‘Dana Cadangan’ dilakukan pada akhir periode akuntansi dan penilaiannya berdasarkan jumlah pembiayaan, yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

- a) Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b) Aset Lain-lain meliputi :
 - Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO/ *Built Operate and Transfer* - BOT),

Piutang angsuran

- a. Piutang Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan atau aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- b. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.



Kemitraan dengan Pihak Ketiga(KSO/BOT)

- a. KSO/BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- b. Penilaian KSO/BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

3.4.2. KEWAJIBAN

- a. Kebijakan Akuntansi Kewajiban atau Utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban;
- b. Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca;
- e. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yg belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan.

b. Utang Pajak

Pada akhir periode pelaporan, saldo pengutan pajak-pajak yang masih berada pada penguasaan bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas negara harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan.

c. Utang Bunga

- Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.
- Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.



- Pengakuan ‘Bagian Lancar Utang Jangka Panjang’ dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

e. Pendapatan Diterima di Muka

- Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan.
- Pengakuan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan penilaian berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan
- Pendapatan Diterima Dimuka terdiri Pendapatan Diterima Dimuka PAD dan Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan kedalam utang PFK, Utang Bunga, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang atau Pendapatan Diterima di Muka.

Kewajiban Utang Jangka Panjang

- Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Luar Negeri.
- Pengakuan ‘Kewajiban Utang Jangka Panjang’ dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
- Penilaian ‘Utang Jangka Panjang’ berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk ‘Utang Jangka Panjang’ dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3.4.3. EKUITAS DANA

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Lancar;
- 2) Ekuitas Dana Investasi; dan
- 3) Ekuitas Dana Cadangan.



Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi SILPA tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Piutang Jangka Pendek, Transfer ke dan dari Dana Cadangan, Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Hutang Jangka Pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang Pokok dan Bunganya.

Ekuitas Dana Lancar meliputi SILPA, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dikurangi dengan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aset Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang, dalam Ekuitas Dana Investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

Ekuitas Dana Investasi meliputi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dikurangi dengan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

- a. Ekuitas Dana Cadangan merupakan jumlah kekayaan bersih berupa aset dicadangkan untuk pembelian/penggantian aset atau untuk keperluan lain yang penetapan tujuan, besaran, sumber dananya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pengakuan Ekuitas Dana Cadangan dilakukan pada periode berjalan sebesar jumlah dana pembiayaan yang ditransfer ke dan diterima dari Dana Cadangan dalam periode berjalan.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;



- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset/aset dan kewajiban pemerintah;
- h. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- i. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- j. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- k. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- l. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- m. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- n. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- o. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- p. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;
- q. Kebijakan Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2014, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan tentang Penyusutan atas Aset Tetap dilakukan setelah inventarisasi fisik atas seluruh aset tetap (sensus) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selesai dilaksanakan atau selama – lamanya tahun 2015. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31a Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi. Inventarisasi telah dilaksanakan secara bertahap dan akan selesai sampai dengan tahun 2015 bersamaan dengan batas akhir penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Pos-pos neraca pada tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut:

ASET :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
Aset	1.799.999.771.872,66	1.610.683.606.364,99
Jumlah	1.799.999.771.872,66	1.610.683.606.364,99

Total Aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.799.999.771.872,66 atau meningkat sebesar Rp189.316.165.507,67 dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.610.683.606.364,99. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

ASET :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a. Aset Lancar	194.851.996.960,55	105.523.394.053,21
b. Investasi Jangka Panjang	14.034.247.117,67	18.208.417.416,16
c. Aset Tetap	1.577.355.824.313,44	1.474.032.683.171,62
d. Dana Cadangan	0,00	0,00
e. Aset Lainnya	13.757.703.481,00	12.919.111.724,00
Jumlah Aset	1.799.999.771.872,66	1.610.683.606.364,99

a. KAS

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLU RSUD, Bendahara Penerimaan SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Kas di Kas Daerah	159.537.537.275,04	74.842.279.725,99
2) Kas di Bendahara Penerimaan	33.918.322,19	114.068.500,00
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4) Kas di FKTP	1.765.401.905,00	0,00
5) Kas di BLUD RSUD	7.422.005.012,06	71.003.876,47
Jumlah	168.758.862.514,29	75.027.352.102,46

Penjelasan secara rinci berkaitan dengansaldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013, dapat disajikan sebagai berikut:

**1) Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo Per 31 Desember 2014 pada Bank Jatim Cabang Probolinggo, BNI 46 Cabang Probolinggo, BRI Cabang Probolinggo, Bank Mandiri Cabang Probolinggo, BTN Cabang Probolinggo, berupa dana di rekening giro bank dan dana di rekening deposito, rekening diatas dirincidengan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Kas Di Bank :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a) Rekening Giro	11.537.537.275,04	6.842.279.725,99
b) Rekening Deposito	148.000.000.000,00	68.000.000.000,00
Jumlah	159.537.537.275,04	74.842.279.725,99

Saldo masing-masing rekening Kas di Bank per 31 Desember 2014 dan 2013, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Rekening Giro

Rekening giro bank adalah dana milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Bank Jatim Cabang Probolinggo dengan nomor rekening 0121000000 dengan rincian saldo per 31 Desember 2014 dan 2013, sebagai berikut:

Rekening Giro Bank :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Bank Jatim Cabang Probolinggo	11.537.537.275,04	6.842.279.725,99
Jumlah	11.537.537.275,04	6.842.279.725,99

Saldo rekening giro per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.537.537.275,04 atau lebih tinggi sebesar Rp4.695.257.549,05 dibanding posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.842.279.725,99. Dimana didalamnya terdapat sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang belum direalisasikan sebesar Rp603.950.655,00. Rekening giro tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/4/KEP/425.012/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Rekening Bank pada Bank yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Kota Probolinggo Sebagai Bank Persepsi Tahun Anggaran 2014.

b) Rekening Deposito

Rekening deposito merupakan dana milik Pemerintah Kota Probolinggo yang penempatan rekeningnya pada deposito Bank Jatim Cabang Probolinggo, BNI 46 Cabang Probolinggo, BRI Cabang Probolinggo, Bank Mandiri Cabang Probolinggo, BTN Cabang Probolinggo dengan rincian saldo per 31 Desember 2014 dan 2013, sebagai berikut:

Rekening Deposito:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
(1) Bank Jatim Cab. Probolinggo	108.000.000.000,00	50.000.000.000,00
(2) BNI 46 Cab. Probolinggo	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
(3) BRI Cab. Probolinggo	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00
(4) Bank Mandiri Cab. Probolinggo	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00
(5) Bank BTN Cab. Probolinggo	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00
Jumlah	148.000.000.000,00	68.000.000.000,00



Saldo Deposito per 31 Desember 2014 sebesar Rp148.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp80.000.000.000,00 (217,65%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2013. Penempatan Deposito pada Perbankan tersebut di atas merupakan Deposito jangka 1 (satu) bulan. Deposito dapat dicairkan setiap saat tanpa dikenakan penalti.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2014 dan 2013 yang merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Kas Daerah, kas di bendahara tersebut dapat dirinci saldo per 31 Desember 2014 dan 2013, sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Dinas Kesehatan	1.658.000,00	76.556.000,00
2) RSUD	29.271.812,00	13.284.000,00
3) Dinas Perhubungan	1.467.000,00	2.048.500,00
4) Dinas Koperindag	0,00	22.180.000,00
5) Jasa Giro di Rekening FKTP yang belum disetorkan ke Kas Daerah	1.521.510,19	0,00
Jumlah	33.918.322,19	114.068.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.658.000,00 telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah mulai tanggal 2 s.d 12 Januari 2015 dengan masing-masing nomor STS 0001 s.d 0007, Sedangkan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.467.000,00 telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2014 dengan nomor STS 01/I/2015.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2014 yang merupakan sisa Uang Persediaan yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran dan belum disetor Ke Kas Daerah. Namun sampai per 31 Desember 2014 tidak terdapat Kas pada Bendahara Pengeluaran karena secara keseluruhan sisa Uang Persediaan telah disetor ke Kas Daerah. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor :188.45/2/KEP/425.012/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Uang Persediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp9.825.000.000,00.

4) Kas di Rekening FKTP

Kas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Dinas Kesehatan merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.766.923.415,19 yang merupakan sisa dana kapitasi peserta BPJS kesehatan yang terdaftar pada masing-masing FKTP, dimana sampai dengan 31 Desember 2014 tidak terealisasi secara keseluruhan, kas di FKTP tersebut dapat dirinci saldo per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

Kas di FKTP		31 Desember 2014
		Rp
a) Puskesmas Wonoasih	No. rek. 0121114992	305.369.800,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

			31 Desember 2014
Kas di FKTP			Rp
b)	Puskesmas Ketapang	No. rek. 0121114950	357.672.493,44
c)	Puskesmas Kedopok	No. rek. 0121115018	212.755.572,40
f)	Puskesmas Kanigaran	No. rek. 0121115069	436.386.540,74
g)	Puskesmas Jati	No. rek. 0121115034	288.280.468,51
h)	Puskesmas Sukabumi	No. rek. 0121115026	166.458.540,10
Jumlah			1.766.923.415,19

Dari nilai sebesar Rp1.766.923.415,19 pada kas di FKTP didalamnya terdapat bunga jasa giro sebesar Rp1.521.914,18 yang sampai dengan per 31 Desember 2014 belum disetor ke rekening kas umum daerah, sehingga saldo kas bendahara FKTP adalah sebesar Rp.1.765.401.905,00

5) Kas di BLUD RSUD

Kas di BLUD RSUD merupakan saldo kas yang merupakan sisa kas pada RSUD yang bertindak sebagai BLUD, dimana per 31 Desember 2014 sebesar Rp7.422.005.012,06 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp71.003.876,47 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Kas di BLUD RSUD :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1) Rekening Giro Bank Jatim No. Rek. 012109450	3.784.779.533,06	60.228.698,47
2) Kas pada Bendahara Pengeluaran	637.225.479,00	10.775.178,00
3) Deposito	3.000.000.000,00	0,00
Jumlah Kas di BLUD RSUD	7.422.005.012,06	71.003.876,47

b. PIUTANG

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Piutang :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Piutang Pajak	6.559.187.984,00	8.008.395.075,00
2. Piutang Retribusi	294.901.225,00	134.326.225,00
3. Piutang Lain – Lain	15.672.068.175,00	17.050.134.523,25
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3.733.517.203,38)	(50.419.076,96)
Jumlah Piutang :	18.792.640.180,62	25.142.436.748,29

1) Piutang Pajak

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 tersebut terdiri dari:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Piutang Pajak :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Pajak Hotel.	1.128.136,00	3.218.136,00
2. Pajak Restoran	0,00	0,00
3. Pajak Hiburan	1.500.000,00	0,00
4. Pajak Reklame	342.003.850,00	300.981.350,00
5. Pajak Air Tanah	3.812.140,00	2.111.110,00
6. Pajak Parkir	0,00	125.000,00
7. Pajak PBB	6.210.743.858,00	7.701.959.479,00
Jumlah Piutang :	6.559.187.984,00	8.008.395.075,00

Saldo masing-masing jenis piutang pajak tersebut per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Terdapat saldo piutang pajak hotel per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.128.136,00 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Hotel:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	3.218.136,00	149.900.159,00
2. Penyesuaian Piutang	0,00	112.410.121,00
3. Penambahan	578.532.427,00	490.738.510,00
4. Pengurangan	580.622.427,00	525.010.412,00
Jumlah Piutang :	1.128.136,00	3.218.136,00

Penambahan sebesar Rp578.532.427,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2014, sedangkan pengurangan sebesar Rp580.622.427,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak hotel tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp577.404.291,00 dan Rp3.218.136,00.

2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Tidak terdapat saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Restoran:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	0,00	53.096.190,00
2. Penambahan	2.131.583.570,00	1.897.539.783,00
3. Pengurangan	2.131.583.570,00	1.950.635.973,00
Jumlah Piutang :	0,00	0,00

Penambahan sebesar Rp2.131.583.570,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2014, sedangkan pengurangan sebesar Rp2.131.583.570,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak restoran tahun 2014.

**3. Piutang Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Terdapat saldo piutang pajak hiburan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Hiburan:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	0,00	29.050.000,00
2. Penambahan	434.260.952,00	293.458.485,00
3. Pengurangan	432.760.952,00	322.508.485,00
Jumlah Piutang :	1.500.000,00	0,00

Penambahan sebesar Rp434.260.952,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2014, sedangkan pengurangan sebesar Rp432.760.952,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak hiburan tahun 2014

4. Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Terdapat saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2014 sebesar Rp342.003.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Reklame:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	300.981.350,00	116.198.000,00
2. Penambahan	901.894.121,00	984.575.911,00
3. Pengurangan	860.871.621,00	799.792.561,00
Jumlah Piutang :	342.003.850,00	300.981.350,00

Penambahan sebesar Rp901.894.121,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2014, sedangkan pengurangan sebesar Rp860.871.621,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp559.890.271,00 dan Rp300.981.350,00.

5. Piutang Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Terdapat saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.812.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Air Tanah:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	2.111.110,00	1.348.488,00
2. Penambahan	328.130.037,00	281.478.910,00
3. Pengurangan	326.429.007,00	280.716.288,00
Jumlah Piutang :	3.812.140,00	2.111.110,00



Penambahan sebesar Rp328.130.037,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2014, sedangkan pengurangan sebesar Rp326.429.007,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak air tanah tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp324.317.897,00 dan Rp2.111.110,00.

6. Piutang Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Tidak terdapat saldo piutang pajak parkir per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Parkir:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	125.000,00	2.230.000,00
2. Penambahan	54.257.000,00	48.045.000,00
3. Pengurangan	54.382.000,00	50.150.000,00
Jumlah Piutang :	0,00	125.000,00

Penambahan sebesar Rp54.257.000,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2014, sedangkan pengurangan sebesar Rp54.382.000,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak parkir tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp54.257.000,00 dan Rp125.000,00.

7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak Per 1 Januari 2013 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, Aset Sitaan dan Berkas Permohonan Perubahan PBB-P2 yang diajukan setelah *Cut – Off* Nomor : BA-1/WPJ.12/KP.06 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Probolinggo dan Walikota Probolinggo.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:BA-37/WPJ.12/KP.06/2013, piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama Probolinggo ke Pemerintah Kota Probolinggo pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp9.904.573.047,00 dan selama TA 2013 s.d 2014 telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sehingga saldo piutang PBB per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Piutang (PBB-P2):	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	9.714.403.941,00	9.904.573.047,00
2. Penambahan	6.883.340.900,00	0,00
3. Pengurangan	5.587.727.222,00	190.169.106,00
Jumlah Piutang :	11.010.017.619,00	9.714.403.941,00

Penambahan sebesar Rp6.883.340.900,00 merupakan nilai nominal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan selama tahun 2014 sebesar Rp5.949.982.607,00 dan sisanya sebesar Rp933.358.293,00 merupakan saldo piutang PBB-P2 tahun masa pajak 2013, sedangkan pengurangan sebesar Rp5.587.727.222,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

merupakan pembayaran oleh wajib pajak atas piutang PBB untuk tahun masa pajak 2001 sampai 2014. sehingga rincian saldo piutang PBB-P2 berdasarkan realisasi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Piutang PBB	Pembayaran Tahun 2014	Sisa Piutang PBB
	Rp.	Rp.	Rp.
s.d 2001	1.860.174.499,00	462.107,00	1.859.712.392,00
2002	409.924.104,00	114.054,00	409.810.050,00
2003	418.580.046,00	263.987,00	418.316.059,00
2004	358.910.791,00	548.753,00	358.362.038,00
2005	386.542.067,00	670.564,00	385.871.503,00
2006	481.823.264,00	1.837.287,00	479.985.977,00
2007	890.022.483,00	2.806.741,00	887.215.742,00
2008	1.042.078.848,00	28.635.811,00	1.013.443.037,00
2009	841.516.149,00	55.957.639,00	785.558.510,00
2010	1.338.965.784,00	74.725.803,00	1.264.239.981,00
2011	849.391.709,00	63.816.177,00	785.575.532,00
2012	836.474.197,00	82.113.376,00	754.360.821,00
2013	933.358.293,00	162.276.991,00	771.081.302,00
2014	5.949.982.607,00	5.113.497.932,00	836.484.675,00
Jumlah	16.597.744.841,00	5.587.727.222,00	11.010.017.619,00

- Piutang PBB tahun pajak s.d tahun 2001 sebesar Rp1.860.745.248,00 masih dalam proses usulan penghapusan yang diajukan oleh KPP Pratama, namun terdapat realisasi pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar Rp570.749,00 dan Rp462.107,00 sehingga saldo per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp1.859.712.392,00
- Piutang PBB tahun pajak 2002 s.d tahun 2007 sebesar Rp2.952.224.453,00 tidak dapat diakui sebagai piutang karena telah dihapuskan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.945.965.005,00 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/357/KEP/425.012/2013 tanggal 27 Desember 2013 karena telah kadaluwarsa masa tagihnya. Dan nilai sebesar Rp6.421.698,00 merupakan pembayaran oleh Wajib Pajak tahun 2013 yang terdiri dari pembayaran sebelum SK Penghapusan terbit sebesar Rp6.259.448,00 dan pembayaran tanggal 30 Desember 2013 (setelah SK Penghapusan terbit) sebesar Rp162.250,00 sehingga jumlah penghapusan piutang pajak PBB tahun 2002 s.d 2007 sebesar Rp2.945.802.755,00 (Rp2.945.965.005,00 – Rp162.250,00).
- Piutang PBB tahun 2008 s.d 2012 sebesar Rp5.091.603.346,00 dan terdapat realisasi pembayaran oleh wajib pajak pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar Rp183.176.659,00 dan Rp305.248.806,00 sehingga saldo per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp4.603.177.881,00

Tahun 2014 Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 65.026 lembar dengan nilai sebesar Rp5.949.982.607,00 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp5.113.497.932,00 atas 50.609

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

lembar SPPT. Sedangkan penetapan Saldo piutang PBB per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal :

- Piutang 2008 s.d 2012	Rp	4.603.177.881,00
- Piutang Tahun pajak 2013	Rp	933.358.293,00
Jumlah	Rp	5.536.536.174,00

Penambahan :

- Penerbitan SPPT tahun 2014	Rp	5.949.982.607,00
Jumlah Penambahan	Rp	5.949.982.607,00

Pengurangan :

- Realisasi Pembayaran atas SPPT 2014	Rp	5.113.497.932,00
- Realisasi Pembayaran untuk piutang Thn 2013	Rp	162.276.991,00
Jumlah Pengurangan	Rp	5.275.774.923,00

Saldo Akhir Piutang PBB Tahun 2014**Rp 6.210.743.858,00****2) Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2014 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, terdiri dari:

Piutang Retribusi :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	72.140.725,00	72.376.225,00
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kesehatan	149.630.500,00	0,00
c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum	73.130.000,00	61.950.000,00
Jumlah Piutang Retribusi :	294.901.225,00	134.326.225,00

Saldo masing-masing jenis piutang retribusi tersebut per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Terdapat saldo piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp72.140.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Piutang Retribusi:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal	72.376.225,00	84.113.225,00
2. Penambahan	423.977.300,00	246.964.775,00
3. Pengurangan	424.212.800,00	258.701.775,00
Jumlah Piutang	72.140.725,00	72.376.225,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berasal dari Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL), Retribusi Rusunawa, Retribusi Sewa Bedak, Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Retribusi Sewa Tanah. Penambahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp423.977.300,00 merupakan penetapan SKRD selama Tahun 2014. Sedangkan pengurangan sebesar Rp424.212.800,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD Tahun 2014 sebesar Rp351.836.575,00 dan 2013 sebesar Rp72.376.225,00 (Lampiran I).

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kesehatan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp149.630.500,00 merupakan piutang retribusi yang berasal dari Klaim Jamkesmas tahun 2013 berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2014, nomor : HK.02.02/MENKES/464/2014 tentang penerima pembayaran kekurangan dana klaim penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Retribusi:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	0,00	0,00
2. Penambahan	149.630.500,00	0,00
3. Pengurangan	0,00	0,00
Jumlah Piutang :	149.630.500,00	2.050.000,00

c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum tersebut merupakan retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, dimana terdapat 4 (empat) Rusunawa yang antara lain : Bayuangga Blok A, Bayuangga Blok B, Bestari dan Semeru. Per 31 Desember 2014 terdapat saldo piutang sebesar Rp73.130.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Retribusi:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	61.950.000,00	0,00
2. Penambahan	338.050.000,00	363.000.000,00
3. Pengurangan	326.870.000,00	301.050.000,00
Jumlah Piutang :	73.130.000,00	61.950.000,00

Penambahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp338.050.000,00 merupakan penetapan SKRD selama Tahun 2014. Pengurangan sebesar Rp326.870.000,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD Tahun 2014.

**3) Piutang Lain – Lain**

Saldo piutang lain – lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp15.672.068.175,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp17.050.134.523,25 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang Lain - Lain :	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Piutang Uang Muka Perumahan	92.913.758,00	198.167.640,00
2. Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Moh. Saleh	9.536.110.984,00	5.923.220.397,25
3. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo	18.100.000,00	25.726.000,00
4. Piutang Dana Bagi Hasil PPh 21	0,00	1.067.760.929,00
5. Piutang Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga dari Provinsi Jawa Timur	6.024.943.433,00	9.835.259.557,00
Jumlah Piutang :	15.672.068.175,00	17.050.134.523,25

a. Piutang Uang Muka Perumahan yang dibangun Perum Perumnas

Saldo piutang uang muka perumahan per 31 Desember 2014 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Piutang uang muka perumahan merupakan saldo piutang kepada pegawai Pemerintah Kota Probolinggo (PNS) berupa pemberian pinjaman uang muka dalam pembelian/kredit perumahan yang dibangun Perum Perumnas.

No	Piutang UM BTN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Saldo Awal	198.167.640,00	325.797.375,00
2	Piutang Uang Muka Perumahan terbayar	105.253.882,00	127.629.735,00
3	Saldo Piutang Uang Muka Perumahan	92.913.758,00	198.167.640,00

Per 31 Desember 2014, saldo piutang uang muka perumahan sebesar Rp92.913.758,00 merupakan saldo tahun 2013 sebesar Rp198.167.640,00 dikurangi realisasi pembayaran atas piutang uang muka perumahan tahun 2014 sebesar Rp105.253.882,00. Seluruh Piutang Uang muka Perumahan sebesar Rp1.509.897.000,00, realisasi angsuran sampai dengan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.416.983.242,00 (Lampiran II).

b. Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Moh. Saleh.

Piutang Klaim atas pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang Pelayanan Kesehatan:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal	5.923.220.397,25	1.231.655.490,34
2. Penambahan	62.080.496.370,56	22.871.528.908,25
3. Pengurangan	58.467.605.783,81	18.179.964.001,34
Jumlah Piutang	9.536.110.984,00	5.923.220.397,25

Saldo piutang klaim atas pelayanan kesehatan RSUD Dr.Mohammad Saleh pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Piutang Pelayanan Kesehatan:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	PT. Kertas Leces	503.908.011,00	496.897.576,00
2	PT. Telkom	181.055.708,00	21.200.583,00
3	PT. Eratex Djaja	234.793.086,00	96.405.300,00
4	PT. Kereta Api Indonesia	10.888.400,00	17.294.300,00
5	PT. IPMOMI	0,00	22.215.200,00
6	PT. Indopherin	9.439.639,00	0,00
7	PT. PLN	0,00	20.000,00
8	PT. Jamsostek	0,00	24.343.830,00
9	PT. Sasa Inti	2.717.953,00	0,00
10	PT. YTL	0,00	0,00
11	Asuransi Kresna	8.719.750,00	8.719.750,00
12	PT. PJB UP Paiton	0,00	15.000,00
13	Jamkesda	15.418.100,00	12.244.759,25
14	Jamkesmas	0,00	4.743.145.632,00
15	PT. Askes	0,00	449.735.500,00
16	In Health	256.700,00	0,00
17	PT. Panasonic	10.056.432,00	0,00
18	PT. BFI	8.511.899,00	0,00
19	Nayaka Era Husada	18.130.417,00	30.961.387,00
20	BPJS	8.466.249.059,00	0,00
21	PT Cahaya Medika	0,00	21.580,00
22	Jasa Raharja	65.965.830,00	0,00
Jumlah		9.536.110.984,00	5.923.220.397,25

Mutasi Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Moh. Saleh dapat dilihat pada Lampiran III.

c. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan salah satu sumber Lain – lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo merupakan jasa pelayanan iklan yang belum terbayar sampai dengan per 31 Desember 2014. Saldo Piutang Radio Suara Kota per 31 Desember 2014 sebesar Rp18.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Radio Suara Kota	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Saldo Awal.	25.726.000,00	0,00
2. Penambahan	129.102.000,00	191.103.000,00
3. Pengurangan	136.728.000,00	165.377.000,00
Jumlah Piutang :	18.100.000,00	25.726.000,00

Nilai sebesar Rp129.102.000,00 merupakan penambahan berdasarkan surat Order yang diterbitkan selama tahun 2014 dan nilai sebesar 136.728.000,00 merupakan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

pengurangan atas pembayaranselama tahun 2014sebesar Rp111.002.000,00 dan 2013 sebesar Rp25.726.000,00.

Saldo tersebut diatas per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan terdiri atas :

Piutang Radio Suara Kota:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. PT. Surabaya Ad	1.500.000,00	7.360.000,00
2. PT. CAN	15.000.000,00	12.000.000,00
3. Bio HSA	0,00	500.000,00
4. PT. Jasa Raharja	0,00	1.250.000,00
5. Tabib A. Nasir	0,00	208.000,00
6. Serikat Tani	0,00	208.000,00
7. Telkomsel Jember	0,00	3.000.000,00
8. SoMan	0,00	1.200.000,00
9. Safira Tour & Travel	600.000,00	0,00
10. Ridicomp	1.000.000,00	0,00
Jumlah Piutang :	18.100.000,00	25.726.000,00

d. Piutang Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga dari Provinsi Jawa Timur.

Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan transfer pemerintah provinsi yang terdiri atas Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil PajakRokok.Saldo piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Piutang DBH:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Piutang DBH PKB	2.187.960.994,00	4.158.653.406,00
2. Piutang DBH BBNKB	1.241.380.664,00	2.547.582.059,00
3. Piutang DBH PBBKB	2.573.535.105,00	3.040.977.669,00
4. Piutang DBH PAP	22.066.670,00	76.458.342,00
5. Piutang SP III	0,00	11.588.083,00
6. Piutang DBH Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah Piutang	6.024.943.433,00	9.835.259.559,00

Saldo piutang tersebut diatas berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2014. Saldo masing-masing jenis piutang dana bagi hasil tersebut per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Piutang DBH:	31 Des 2013	Alokasi DBH sesuai SK Gub	Realisasi Transfer	31 Des 2014
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
1. Piutang DBH PKB	4.158.653.406,00	17.211.472.547,00	19.182.164.959,00	2.187.960.994,00
2. Piutang DBH BBNKB	2.547.582.059,00	13.437.934.345,00	14.744.135.740,00	1.241.380.664,00
3. Piutang DBH PBBKB	3.040.977.669,00	16.936.480.755,00	17.403.923.319,00	2.573.535.105,00
4. Piutang DBH PAP	76.458.342,00	209.018.422,00	263.410.094,00	22.066.670,00
5. Piutang SP III	11.588.083,00	0,00	11.588.083,00	0,00
6. Piutang DBH Pajak Rokok	0,00	6.042.896.468,00	6.042.896.468,00	0,00
Jumlah Piutang	9.835.259.559,00	53.837.802.537,00	57.648.118.663,00	6.024.943.433,00

4) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Penyisihan Piutang:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp.	Rp.
1. Penyisihan Piutang Pajak	3.695.867.622,10	0,00
2. Penyisihan Piutang Retribusi	25.578.915,00	8.094.050,00
3. Penyisihan Piutang Lain - Lain	12.070.666,28	42.325.026,96
Jumlah Penyisihan Piutang	3.733.517.203,38	50.419.076,96

Penyisihan piutang sebesar Rp3.733.517.203,08 diantaranya terdiri atas penyisihan piutang pajak sebesar Rp3.695.867.622,10, yang merupakan penyisihan dari piutang pajak reklame, pajak hotel sebesar Rp6.034.627,20 serta pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebesar Rp3.689.832.994,90 (Lampiran IV), termasuk sebesar Rp. 25.578.915,00 atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta sisanya sebesar Rp12.070.666,28 atas piutang Uang Muka Perumahan PNS (Lampiran V).

c. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Akun Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2014 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2014 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Belanja dibayar dimuka tersebut terdiri dari:

Belanja Dibayar Dimuka :	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp
1. Premi Asuransi Barang Milik Daerah	528.702.213,34	484.766.184,16
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka	528.702.213,34	484.766.184,16

Sesuai dengan Surat Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember Nomor :028/14.11.05.01/KONTRAK.ASET/PPK-DPPKA/2014 tanggal 5 Nopember 2014, dimana surat perjanjian bersama tersebut mengatur tentang pertanggunggunaan pengelolaan asuransi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan asuransi kerugian Barang Milik Daerah



Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun obyek pertanggungan/Asuransi Tahun 2014 tersebut meliputi asuransi kendaraan bermotoratas 86 unit kendaraan bermotor roda empat dan 318 unit kendaraan bermotor roda dua serta asuransi kerugian bahaya kebakaran atas 47 gedung pemerintahan beserta inventaris kantornya dan 7 (tujuh) gedung bangunan pasar beserta sarana dan prasarananya.

	Asuransi	Penanggung	Masa Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Beban Premi yang dibayar	Biaya dibayar dimuka
1	Barang Milik Daerah	PT. Asuransi Jasa Indonesia	05/11/2014 – 31/10/2015	634.442.656,00	105.740.442,66	528.702.213,34
Jumlah						528.702.213,34

d. PERSEDIAAN

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2014 dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		(Rp)	(Rp)
1	Obat dan Alkes pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	4.146.397.893,52	3.238.369.200,60
2	Obat dan Alkes pada Instalasi Farmasi RSUD	1.260.775.479,48	714.599.025,41
3	Obat dan Alkes pada Floor Stock RSUD	655.950.287,00	471.796.699,99
4	Obat dan Alkes pada Dinas Pertanian	14.063.550,00	4.216.100,00
5	Kertas Berharga	330.033.210,00	212.772.940,00
6	Alat Tulis Kantor	60.677.310,00	82.780.121,00
7	Alat Listrik	1.175.300,00	3.810.000,00
8	Cetakan	113.272.000,00	76.773.500,00
9	Alat Kebersihan	7.537.690,00	13.088.250,00
10	Bahan Makan Pasien	3.235.832,30	3.077.131,30
11	Sarana Bangunan	35.301.500,00	75.000,00
12	Sarana Sanitasi	0,00	1.217.500,00
13	Rekam Medik	19.767.000,00	3.938.000,00
14	Benda Pos	1.960.500,00	986.000,00
15	Peralatan Komputer	35.000,00	55.000,00
16	Pakan Hewan	1.279.500,00	1.125.550,00
17	Pakaian Olah Raga	0,00	2.464.000,00
18	Barang Habis Pakai	410.000,00	55.000,00
19	Bahan Kimia Fogging	6.660.000,00	12.395.000,00
20	Gerobak Sampah	0,00	25.245.000,00
21	Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.860.000,00	0,00
22	Hewan Ternak	108.400.000,00	0,00
Jumlah		6.771.792.052,30	4.868.839.018,30

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2014 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	11.724.500,00	29.078.200,00
2	Dinas Kesehatan	4.160.346.893,52	3.257.432.500,60
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.941.610.198,78	1.198.648.206,70
4	Dinas Pekerjaan Umum	340.500,00	214.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.319.355,00	338.600,00
6	Dinas Perhubungan	191.743.410,00	86.177.140,00
7	Badan Lingkungan Hidup	2.172.200,00	33.052.850,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	92.010.100,00	81.592.700,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	476.000,00	302.200,00
10	Dinas Sosial	7.660.470,00	3.439.650,00
11	Dinas Tenaga Kerja	262.000,00	422.000,00
12	Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan	1.810.000,00	2.463.000,00
13	Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	503.050,00	434.500,00
14	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	3.738.100,00	8.021.800,00
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.348.000,00	5.528.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	976.500,00	978.400,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	2.905.100,00	3.250.000,00
18	Bagian Umum	42.976.125,00	47.424.000,00
19	Bagian Organisasi	1.049.500,00	1.296.100,00
20	Bagian Pemerintahan	81.000,00	0,00
21	Bagian Hukum	957.850,00	1.089.050,00
22	Bagian Humas dan Protokol	7.415.150,00	2.918.450,00
23	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	1.040.350,00	2.722.200,00
24	Bagian Administrasi Perekonomian	1.699.000,00	2.638.000,00
25	Bagian Administrasi Pembangunan	750.000,00	443.000,00
26	Sekretariat DPRD	669.100,00	654.500,00
27	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	103.293.000,00	69.833.500,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	1.767.500,00	1.709.500,00
29	Inspektorat	430.900,00	227.500,00
30	Sekretariat KORPRI	1.979.500,00	1.821.000,00
31	Kecamatan Wonoasih	6.000,00	6.000,00
32	Kecamatan Kademangan	268.500,00	933.650,00
33	Kecamatan Mayangan	67.500,00	227.500,00
34	Kecamatan Kedopok	1.144.950,00	1.498.596,00
35	Kecamatan Kanigaran	2.650.500,00	1.485.300,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.260.250,00	11.599.225,00
37	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	1.682.000,00	1.483.500,00
38	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.744.500,00	687.900,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	SKPD	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		(Rp)	(Rp)
39	Dinas Pertanian	167.578.300,00	4.993.850,00
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.334.200,00	1.772.450,00
	Jumlah	6.771.792.052,30	4.868.839.018,30

Mutasi Persediaan dapat dilihat pada Lampiran VI.

e. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomik sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Kota per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Investasi Non Permanen	3.957.409.104,51	4.037.909.980,93
2) Investasi Permanen	10.076.838.013,16	14.170.507.435,23
Jumlah	14.034.247.117,67	18.208.417.416,16

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut .

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi Energi Mineral Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai Peraturan Walikota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a) Dana Bergulir melalui BPD Jatim	2.351.000.000,00	2.351.000.000,00
b) Dana Bergulir melalui BPR Jatim	2.707.500.000,00	2.707.500.000,00
Jumlah	5.058.500.000,00	5.058.500.000,00

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menambah Investasi Dana Bergulir, namun lebih mengoptimalkan pada pengelolaannya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir, maka dalam pelaporan dana bergulir per 31 Desember 2014 Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan *Net Realizable Value* (NRV) atas saldo Dana Bergulir dengan besaran penyisihan sebesar Rp1.101.090.895,49 sehingga saldo investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.957.409.104,51 (Lampiran VII).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan



perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi permanen tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Permanen	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1. Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
2. Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim	1.500.000.000,00	750.000.000,00
3. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo	4.540.416.202,16	8.815.435.977,23
4. Penyertaan Modal pada PT. Utama Tirta Bestari	(313.059.939,00)	255.589.708,00
Jumlah	10.076.838.013,16	14.170.507.435,23

Nilai penyertaan modal mengalami penurunan sebesar Rp4.093.669.422,07 atau 28,88%. Penurunan nilai penyertaan modal terjadi pada PDAM Kota Probolinggo dan PT. Utama Tirta Bestari Kota Probolinggo. Penurunan nilai penyertaan modal yang terjadi pada PDAM Kota Probolinggo disebabkan adanya koreksi alokasi setoran bagian Pemerintah Kota Probolinggo yang selama ini ditetapkan berdasarkan target, seharusnya mendasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Tingkat II Probolinggo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975. Bagian setoran Pemerintah Kota Probolinggo seharusnya 55% dari laba bersih.

Penurunan nilai penyertaan modal terjadi pada PT. UTB disebabkan adanya akumulasi rugi dari tahun 2003 sampai dengan 2014 mempengaruhi penurunan modal PT. UTB sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. UTB juga mengalami penurunan. Saldo masing-masing jenis investasi permanen tersebut per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim

Investasi Permanen	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1. Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
Jumlah	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00

Tidak ada penambahan penyertaan modal pada PT. BPD Jatim pada tahun 2014. Seluruh penyertaan modal pada PT. BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT. BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dan jumlah lembar saham Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. BPD Jatim sebanyak 17.397.927 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) lembar.



b. Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim

Investasi Permanen	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1. Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim	1.500.000.000,00	750.000.000,00
Jumlah	1.500.000.000,00	750.000.000,00

Pemerintah Kota Probolinggo dalam Tahun Anggaran 2014 menambah penyertaan modal pada PT. BPR Jatim sebesar Rp750.000.000,00. Sehingga seluruh penyertaan modal pada PT. BPR Jatim semula sebesar Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00. Penambahan penyertaan modal tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT. BPR Jatim menggunakan metode biaya.

Saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dan jumlah lembar saham Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. BPR Jatim sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar.

c. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas karena PDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Perhitungan metode ekuitas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Probolinggo	7.607.051.764,99	7.607.051.764,99
2	Akumulasi Laba (rugi)	2.059.511.738,17	6.334.531.513,24
3	Jumlah	9.666.563.503,16	13.941.583.278,23
4	Akumulasi Bagian Laba PDAM yang disetor ke Kas Daerah (Tahun 1983 – 2014)	(5.126.147.301,00)	(5.126.147.301,00)
5	Jumlah Penyertaan Modal	4.540.416.202,16	8.815.435.977,23
6	Saldo Awal	8.815.435.977,23	8.057.642.438,62
7	Penyertaan Modal (Metode Ekuitas)	4.540.416.202,16	8.815.435.977,23
8	Kenaikan/(Penurunan) Nilai Penyertaan Modal	(4.275.019.775,07)	757.793.538,61
Akumulasi laba (rugi) sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.059.511.738,17 dapat dijelaskan sebagai berikut:			
9	Saldo 1 Januari	757.793.538,61	5.576.737.974,63
10	Laba (rugi) Tahun Berkenaan (<i>Unaudit</i>)	1.301.716.198,56	757.793.538,61
11	Akumulasi laba (rugi) s.d. 31 Desember	2.059.511.738,17	6.334.531.513,24

Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2014 tidak menambah penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo



tetap sebesar Rp7.607.051.764,99 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo.

Penghitungan Metode Ekuitas untuk Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2014. Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 direviu oleh Inspektorat, Laporan Keuangan PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 masih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan.

d. Penyertaan Modal pada PT. Utama Tirta Bestari (PT. UTB)

PT. UTB, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014. Hasil RUPS dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 11, Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas dinyatakan bubar. Pembubaran melalui RUPS tersebut dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Penyertaan modal pada PT. UTB per 22Juli 2014 disajikan berdasarkan Laporan Audit Tujuan Tertentu Pada PT. UTB Kota Probolinggo Nomor : LATT-1525/PW13/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Perhitungan penyertaan modal menggunakan metode ekuitas, karena seluruh kepemilikan saham adalah Pemerintah Kota Probolinggo. Perhitungan metode ekuitas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal pada PT. UTB	22Juli 2014 Rp	31 Desember 2013 Rp
1	Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Probolinggo	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
2	Akumulasi Laba/(Rugi) (<i>Audited</i>)	(2.856.899.683,20)	(2.311.225.857,00)
3	Laba/(Rugi) (<i>Audited</i>)	(81.160.255,80)	(58.184.435,00)
4	Jumlah	(313.059.939,00)	255.589.708,00
5	Bagian Laba PT. UTB yang disetor ke Kas Daerah (<i>Audited</i>)	0,00	0,00
6	Jumlah Penyertaan Modal	(313.059.939,00)	255.589.708,00
7	Saldo Awal	255.589.708,00	313.774.143,33
8	Penyertaan Modal (Metode Ekuitas)	(313.059.939,00)	255.589.708,00
9	Kenaikan (Penurunan) Nilai Penyertaan Modal	(568.649.647,00)	(58.184.435,00)

Akumulasi laba (rugi) s.d. 22Juli 2014 adalah laporan laba (rugi) berdasarkan Laporan Audit Tujuan Tertentu. Selama beroperasi PT. UTB belum pernah menyetorkan bagian laba ke Kas Daerah.

Jumlah penyertaan modal semula sebesar Rp2.625.000.000,00 merupakan realisasi pembayaran sebesar Rp2.114.977.000,00 berdasarkan Kontrak Kerjasama Pendirian dan



Pengoperasian Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan di Probolinggo Nomor :690/116b/432.301/2002 – 120/SPK/ACG-PRB/05/2002 tanggal 3 Mei 2002 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :690/116b/432.301/2002 – 120/SPK/ACG-PRB/05/2002 tanggal 3 Mei 2002 antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan PT. Air Cerdas Ganesha Bandung tentang Pembangunan Pendirian dan Pengoperasian Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan dan penghibahan saham dari Pemerintah Kota Probolinggo sehingga total nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo kepada PT. UTB sebesar Rp2.625.000.000,00 (Rp2.114.977.000,00 + Rp510.023.000,00) dan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki seluruh saham milik PT. UTB. Sesuai dengan rekomendasi BPK – RI kepada Walikota Probolinggo berdasarkan LHP BPK – RI atas LKPD Kota Probolinggo Tahun 2011 bahwasannya telah dilakukan koordinasi dengan DPRD Kota Probolinggo terkait kelangsungan PT. UTB. Pemerintah Kota Probolinggo memilih opsi untuk membubarkan/melikuidasi PT. UTB.

Laporan Keuangan PT. UTB per 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan. Adanya akumulasi rugi sebesar Rp2.856.899.683,20 dari tahun 2003 sampai dengan 2014 mempengaruhi penurunan modal PT. UTB sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. UTB juga mengalami penurunan.

f. ASET TETAP

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 dan 2013. Perolehan aset tetap Pemerintah Kota Probolinggo berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.577.355.824.313,44 dan Rp1.474.032.683.171,62, dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Tanah	374.012.613.868,00	363.850.242.260,00
2) Peralatan dan Mesin	237.583.340.386,41	202.672.524.914,41
3) Gedung dan Bangunan	437.785.761.927,26	411.008.241.963,48
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	508.444.016.352,17	476.964.895.678,23
5) Aset Tetap Lainnya	18.777.549.215,50	18.253.465.115,50
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	752.542.564,10	1.283.313.240,00
7) Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah	1.577.355.824.313,44	1.474.032.683.171,62

Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Probolinggo tahun anggaran 2014 sebesar Rp106.923.357.838,72, namun setelah dilakukan rekonsiliasi dan validasi atas barang milik daerah antara Pengurus Barang SKPD dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, nilai aset tetap Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2014 sebesar Rp103.323.141.141,82 terjadi koreksi sebesar Rp3.600.216.696,90 dengan rincian sebagai berikut :

**Penambahan Aset Tetap**

- Penambahan aset tetap yang diperoleh dari pemberian hadiah atas penyelenggaraan lomba Kelurahan Berhasil dan Desain Website oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan ke beberapa SKPD yang didanai dari belanja barang dan jasa (belanja cinderamata, hadiah, trophy, piagam dan sejenisnya). Rp 26.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan atas pekerjaan Pembangunan Gazebo Ruang Pengunjung Pasar Hewan pada Dinas Pertanian yang dianggarkan dalam rekening barang/jasa untuk dikapitalisasi ke aset induknya Rp 5.507.000,00

Rp 31.507.000,00**Pengurangan Aset Tetap**

- Aset Tetap yang tidak memenuhi standar kapitalisasi (*extracomptable*) Rp 2.463.870.347,90
- Aset Tetap yang di hibahkan kepada lembaga sekolah swasta dan masyarakat Rp 29.246.550,00
- Aset Tidak Berwujud berupa Piranti Lunak (*software*) Rp 197.110.600,00
- Koreksi terhadap biaya perolehan aset yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Rp 660.996.199,00
- Penyelesaian kewajiban kepada PT. PRIMERA ADI PERKASA atas Pengadaan 1 unit Mobile X Ray yang telah selesai pekerjaannya dan telah diserahkan terimakan ke Dinas Kesehatan namun hingga per 31 Desember 2013 belum terbayar. Rp 280.500.000,00

JUMLAH**Rp 3.631.723.696,90**

Penjelasan lebih rinci atas masing - masing jenis aset tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp374.012.613.868,00 dan Rp363.850.242.260,00 dengan rincian tahun 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Tanah	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1 Saldo Awal	363.850.242.260,00	363.560.286.260,00
2 Penambahan Tahun 2014	10.162.371.608,00	384.063.000,00
3 Pengurangan Tahun 2014	0,00	94.107.000,00
Jumlah	374.012.613.868,00	363.850.242.260,00

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp10.162.371.608,00 adalah penambahan murni atas pembelian atau pengadaan tanah berdasarkan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2014 pada 2 (dua) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dengan rincian sebagai berikut :



Tanah	31 Desember 2014
	Rp
1 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.703.347.000,00
2 Dinas Pekerjaan Umum	3.459.024.608,00
Jumlah	10.162.371.608,00

Adapun realisasi belanja sebesar Rp10.162.371.608,00 tersebut diantaranya sebesar Rp6.703.347.000,00 digunakan untuk pengadaan/pembelian sejumlah tanah persawahan dengan luas keseluruhan 22.764 m², Sedangkan sisanya sebesar Rp3.459.024.608,00 digunakan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan kawasan Geladak Serang.

Aset tetap tanah Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari 744 bidang seluas 2.680.502 m². Tersebar di 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Probolinggo dan sebagian di wilayah Kabupaten Probolinggo, dengan kondisi 634 bidang telah bersertifikat, 47 bidang di Badan Pertanahan Nasional masih dalam proses pensertifikatan tahun 2014 dan 63 bidang belum bersertifikat. Dalam rangka pengamanan aset setiap tahun anggaran dilakukan sertifikasi secara bertahap sampai dengan seluruh aset tetap tanah bersertifikat. Dalam rangka pengamanan aset setiap tahun anggaran dilakukan sertifikasi secara bertahap sampai dengan seluruh aset tetap tanah bersertifikat.

Di atas tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo berdiri bangunan berupa pertokoan Probolinggo Plaza yang dibangun oleh Pihak III belum diserahkan karena masih diadakan upaya hukum untuk memperjelas status kepemilikannya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, sampai dengan saat ini sudah ada kesepakatan bahwa PT. Avila Prima akan menyerahkan Probolinggo Plaza kepada Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2017 dan hal – hal lainnya, sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian, akan diatur lebih lanjut oleh para pihak.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing masing sebesar Rp237.583.340.386,41 dan Rp202.672.524.914,41 dapat dirinci sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1 Saldo Awal	202.672.524.914,41	180.568.861.825,23
2 Penambahan Tahun 2014	38.616.216.905,00	23.764.232.919,18
3 Pengurangan Tahun 2014	3.705.401.433,00	1.660.569.830,00
Jumlah	237.583.340.386,41	202.672.524.914,41

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2014 sebesar Rp38.616.216.905,00 berasal dari pembelian/pengadaan Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan realisasi belanja modal sebesar Rp 36.241.934.933,00 dan penambahan dari belanja barang dan jasa atas pemberian hadiah pada pelaksanaan kegiatan lomba Kelurahan Berhasil dan Kegiatan Kota Sehat oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan sebesar Rp26.000.000,00 serta sisanya sebesar 2.348.281.972,00 merupakan penambahan atas reklasifikasi antar akun pada neraca dan mutasi aset antar SKPD masing-masing sebesar Rp1.960.653.472,00 dan Rp387.628.500,00 berdasarkan hasil rekonsiliasi barang milik daerah antara Pengurus Barang SKPD dengan Bidang Aset pada DPPKA Kota Probolinggo.



Sedangkan Koreksi (pengurangan) aset tetap peralatan dan mesin tahun 2014 sebesar Rp3.705.401.433,00, dimana diantaranya terdiri atas aset yang harga perolehannya tidak memenuhi standar kapitalisasi (extracomptable) sebesar Rp836.518.511,00, aset yang telah dihibahkan kepada masyarakat sebesar Rp15.543.000,00, serta biaya perolehan berupa biaya atribusi (administrasi proyek) dan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar Rp95.011.000,00 sisanya sebesar Rp2.758.328.922,00 adalah pengurangan nilai aset karena reklasifikasi antar akun pada neraca dan mutasi aset antar SKPD masing-masing sebesar Rp2.090.200.422,00 dan Rp387.628.500,00 serta penyelesaian kewajiban utang jangka pendek sebesar Rp280.500.000,00 kepada PT. PRIMERA ADI PERKASA atas Pengadaan 1 unit Mobile X Ray yang telah selesai pekerjaannya dan telah diserahkan terimakan ke Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2013 berdasarkan hasil rekonsiliasi barang milik daerah antara pengurus barang dengan Bidang Aset pada DPPKA Kota Probolinggo.

Berikut rincian aset tetap peralatan mesin Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 :

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
Alat -Alat Berat	7.702.323.650,00	7.145.891.650,00
Alat- Alat Angkutan	48.085.406.704,00	39.262.041.704,00
Alat Bengkel	1.048.027.215,00	906.048.215,00
Alat Pertanian dan Peternakan	4.327.397.150,00	3.702.741.550,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	82.560.404.908,21	74.051.592.167,21
Alat Studio Dan Alat Komunikasi	8.318.581.690,18	7.375.046.040,18
Alat Ukur	2.098.709.700,00	1.961.500.700,00
Alat-Alat Kedokteran	69.257.717.579,60	55.401.131.729,60
Alat Laboratorium	11.377.643.213,42	10.277.109.654,42
Alat-Alat Keamanan	2.807.128.576,00	2.589.421.504,00
Jumlah	237.583.340.386,41	202.672.524.914,41

Sampai dengan per 31 Desember 2014 aset tetap alat-alat angkutan sebesar Rp48.085.406.704,00 untuk jenis alat angkutan bermotor terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 213 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 58 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 574 unit, Sedangkan untuk jenis kendaraan alat angkutan tidak bermotor berjumlah 103 unit terdiri dari gerobak sebanyak 42 unit , container sampah 36 unit, kereta dorong 17 unit, sepeda 4 unit perahu karet dan sampan masing-masing 1 unit serta canoe 2 unit.

Dari sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo 10 diantaranya dipinjam pakai oleh beberapa instansi dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Kijang Innova G M/T(bensin) dipinjam pakai oleh Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
2. 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Avanza 1,3 E dipinjam pakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. 1 unit kendaraan roda 4 Truck Dalmas dipinjam pakai oleh Polresta Probolinggo.
4. 1 unit kendaraan roda 4 Ambulance dipinjam pakai oleh Polresta Probolinggo.
5. 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Innova dipinjam pakai oleh Polresta Probolinggo



6. 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Terios dipinjam pakai oleh Polisi Militer (Denpom V/3-1)
7. 1 unit kendaraan roda 4 Suzuki APV Arena dipinjam pakai oleh Badan Amil Zakat
8. 1 unit kendaraan roda 2 Honda Tiger dipinjam pakai oleh Polresta Probolinggo.
9. 1 unit kendaraan roda 2 Honda NF dipinjam pakai oleh Majalah Bedug.
10. 1 unit kendaraan roda 2 Yamaha Vega ZR dipinjam pakai oleh FKUB Kota Probolinggo.

3) Gedung dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp437.785.761.927,26 dan Rp411.008.241.963,48 dapat dirinci sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Saldo Awal	411.008.241.963,48	384.258.483.444,47
2	Penambahan Tahun 2014	29.761.077.389,10	30.925.781.192,01
3	Pengurangan Tahun 2014	2.983.557.425,32	4.176.022.673,00
Jumlah		437.785.761.927,26	411.008.241.963,48

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2014 sebesar Rp29.761.077.389,10 berasal dari pembelian/pengadaan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi belanja modal sebesar Rp27.558.543.703,10 dan penambahan dari Belanja Jasa Konsultan Perencanaan atas pekerjaan Pembangunan Gazebo Ruang Pengunjung Pasar Hewan pada Dinas Pertanian yang dianggarkan dalam rekening barang/jasa sebesar Rp5.507.000,00, Sedangkan sisanya sebesar Rp2.197.026.686,00 merupakan penambahan atas reklasifikasi antar akun pada neraca, dimana didalamnya terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tahun 2013 sebesar Rp1.283.313.240,00 yang telah selesai pekerjaannya dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Probolinggo.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp2.983.557.425,32 dimana diantaranya terdiri atas aset gedung dan bangunan yang harga perolehannya tidak memenuhi standar kapitalisasi (*extracomptable*) sebesar Rp188.844.048,90 dan koreksi atas biaya perolehan berupa biaya atribusi (administrasi proyek) dan biaya perolehan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar Rp561.407.499,00 serta sisanya sebesar Rp2.233.305.877,42 merupakan pengurangan karena reklasifikasi antar akun pada neraca, dimana diantaranya sebesar Rp752.542.564,10 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2014 atas Pembangunan Tribun Stadion Bayuangga oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp707.646.063,10, Biaya perencanaan atas rehabilitasi beberapa gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp39.896.501,00 dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 merupakan Biaya Pra Design Pembangunan R. Rawat Inap Kelas III RSUD dr. Moh. Saleh.

Nilai mutasi tahun 2014 tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi antara pengurus barang dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.

Aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
Bangunan Gedung	428.419.465.204,16	402.638.827.513,48
Bangunan Monumen	9.366.296.723,10	8.369.414.450,00
Jumlah	437.785.761.927,26	411.008.241.963,48

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp508.444.016.352,17 dan Rp476.964.895.678,23 dapat dirinci sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1 Saldo Awal	476.964.895.678,23	460.044.486.958,68
2 Penambahan Tahun 2014	33.300.437.018,94	20.972.427.759,55
3 Pengurangan Tahun 2014	1.821.316.345,00	4.052.019.040,00
Jumlah	508.444.016.352,17	476.964.895.678,23

Penambahan aset tetap irigasi dan jaringan Tahun 2014 sebesar Rp33.300.437.018,94 berasal dari pembelian/pengadaan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi belanja modal sebesar Rp31.288.217.526,62 dan sisanya sebesar Rp2.012.219.492,32 merupakan penambahan atas reklasifikasi antar akun pada neraca dan mutasi aset antar SKPD masing-masing sebesar Rp1.919.805.327,32 dan Rp 92.414.165,00.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp1.821.316.345,00 merupakan koreksi pada aset jalan, irigasi dan jaringan yang terdiri atas aset yang harga perolehannya tidak memenuhi standar kapitalisasi (*extracomptable*) sebesar Rp 595.971.420,00, aset yang telah dihibahkan sebesar Rp13.703.550,00 dan koreksi terhadap biaya atribusi (administrasi proyek) yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar Rp4.577.700,00 serta sisanya sebesar Rp1.207.063.675,00 merupakan pengurangan karena reklasifikasi antar akun pada neraca dan mutasi aset antar SKPD masing-masing sebesar Rp1.114.649.510,00 dan Rp92.414.165,00.

Nilai mutasi tahun 2014 berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari :

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
Jalan dan Jembatan	367.922.284.287,78	348.445.995.346,00
Bangunan Air (Irigasi)	116.760.289.647,26	106.975.409.172,42
Instalasi	9.368.426.652,32	7.275.382.215,00
Jaringan	14.393.015.764,81	14.268.108.944,81
Jumlah	508.444.016.352,17	476.964.895.678,23

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp18.777.549.215,50 dan Rp18.253.465.115,50 dapat dirinci sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1 Saldo Awal	18.253.465.115,50	17.834.120.298,50
2 Penambahan Tahun 2014	1.665.528.468,00	794.876.917,00
3 Pengurangan Tahun 2014	1.141.444.368,00	375.532.100,00
Jumlah	18.777.549.215,50	18.253.465.115,50

Penambahan aset tetap lainnya Tahun 2014 sebesar Rp1.665.528.468,00 berasal dari pembelian/pengadaan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi belanja modal sebesar Rp1.475.179.468,00 serta penambahan atas mutasi aset antar SKPD sebesar Rp190.349.000,00.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp1.141.444.368,00 merupakan koreksi terhadap aset tetap lainnya yang terdiri atas aset yang harga perolehannya tidak memenuhi standar kapitalisasi (*extracomptable*) sebesar Rp842.536.368,00 dan sisanya sebesar Rp298.908.000,00 merupakan pengurangan karena reklasifikasi antar akun pada neraca dan mutasi aset antar SKPD masing-masing sebesar Rp108.559.000,00 dan Rp190.349.000,00 berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.

Aset tetap tetap lainnya Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
Buku Dan Perpustakaan	14.969.363.769,64	14.789.931.669,64
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3.180.730.081,86	2.917.078.081,86
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	627.455.364,00	546.455.364,00
Jumlah	18.777.549.215,50	18.253.465.115,50

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap berupa konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp752.542.564,10 dan Rp1.283.313.240,00 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1 Saldo Awal	1.283.313.240,00	5.055.150.500,00
2 Penambahan Tahun 2014	752.542.564,10	1.283.313.240,00
3 Pengurangan Tahun 2014	1.283.313.240,00	5.055.150.500,00
Jumlah	752.542.564,10	1.283.313.240,00

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2014 sebesar Rp752.542.564,10 berasal dari pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan RSUD dr.Moh. Saleh yang sampai dengan per 31 Desember 2014 belum selesai pengerjaannya (Putus Kontrak), Nilai tersebut berupa Pembangunan Tribun Stadion Bayuangga oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp707.646.063,10 dan biaya perencanaan atas rehabilitasi beberapa gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp39.896.501,00 serta sisanya sebesar Rp5.000.000,00 merupakan Biaya Pra Design Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD dr. Moh. Saleh.



Sedangkan pengurangan sebesar Rp1.283.313.240,00 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2013 yang telah selesai pekerjaannya dan diserahkan ke Pemerintah Kota Probolinggo atas Pembangunan Pagar Pengaman Puskesmas Pembantu Pohsangit Kidul sebesar Rp208.704.419,00, Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Probolinggo sebesar Rp180.972.084,00, dan pembangunan Gedung Multi Guna (lanjutan) sebesar Rp893.636.737,00.

Konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari:

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Bangunan Gedung Multiguna (Lanjutan)	0,00	893.636.737,00
2	Pagar Pengaman Puskesmas Pembantu Pohsangit Kidul	0,00	208.704.419,00
3	Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Probolinggo	0,00	180.972.084,00
4	Pembangunan Tribun Stadion Bayuangga	707.646.063,10	0,00
5	Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD dr. Moh. Saleh	5.000.000,00	0,00
6	Rehabilitasi Gedung Lembaga Sekolah pada Dinas Pendidikan	39.896.501,00	0,00
JUMLAH		752.542.564,10	1.283.313.240,00

Mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran VIII, IX dan X.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain aset tanah. Pemerintah Kota Probolinggo telah mengatur kebijakan tentang penyusutan aset tetap ini, namun baru akan diterapkan setelah dilakukan inventarisasi menyeluruh (sensus) atas aset milik Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai selesai atau selama – lamanya tahun 2015 sebagaimana diatur dalam pada Peraturan Walikota Probolinggo nomor 31a Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

Khusus jenis aset Tanah, Bangunan, dan Kendaraan telah dilakukan penilaian oleh PT. Duta Wiryasolo, Jawa Tengah pada tahun 2003. Terkait dengan aset tetap telah mulai dilaksanakan inventarisasi dan labelisasi secara bertahap untuk beberapa KIB yang dikelola oleh SKPD. Inventarisasi dan labelisasi dilaksanakan secara swakelola oleh Pengurus Barang dan petugas yang ditunjuk di SKPD - SKPD yang telah ditetapkan dan pengawasan serta koordinasi dilaksanakan oleh Tim Fokus Simda BMD yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/64/KEP/425.012/2014 tanggal 29 Januari 2014



Tentang Tim Fokus Pemantapan Sistem Informasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014.

g. DANA CADANGAN

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Probolinggo tidak membentuk Dana Cadangan:

Dana Cadangan		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Saldo Awal	0,00	2.599.266.081,90
2	Penambahan	0,00	19.023.680,06
3	Pengurangan	0,00	2.618.289.761,96
Jumlah		0,00	0,00

h. ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp13.757.703.481,00 dan Rp12.919.111.724,00 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Aset Lainnya		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Saldo Awal	12.919.111.724,00	8.249.879.683,00
2	Penambahan Tahun 2014	887.353.349,00	4.669.232.041,00
3	Pengurangan Tahun 2014	48.761.592,00	0,00
Jumlah		13.757.703.481,00	12.919.111.724,00

Penambahan aset lainnya Tahun 2014 sebesar Rp887.353.349,00 berasal dari pembelian/pengadaan piranti lunak (*software*) Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi belanja modal sebesar Rp197.110.600,00 dan penambahan nilai hasil reklasifikasi antar akun pada neraca sebesar Rp690.242.749,00 dimana didalamnya nilai sebesar Rp29.246.550,00 merupakan nilai koreksi aset yang telah dihibahkan kepada lembaga/masyarakat dan sisanya sebesar Rp660.996.199,00 adalah koreksi atas biaya perolehan aset yang tidak dapat dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp48.761.592,00 adalah koreksi terhadap aset lainnya atas denda keterlambatan pelaksanaan beberapa pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum yang sampai per 31 Desember 2013 belum dibayarkan oleh pihak ketiga sehingga baru terbayarkan pada tahun anggaran 2014.

Nilai mutasi tahun 2014 berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Aset lainnya Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lainnya		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Aset Tak Berwujud	2.968.750.160,00	2.771.639.560,00
2	Aset Lain – lain	10.788.953.321,00	10.147.472.164,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Aset Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
	13.757.703.481,00	12.919.111.724,00

Jumlah

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2.968.750.160,00. dan Rp2.771.639.560,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1 Saldo Awal	2.771.639.560,00	1.951.037.810,00
2 Penambahan Tahun 2014	197.110.600,00	820.601.750,00
3 Pengurangan Tahun 2014		0,00
Jumlah	2.968.750.160,00	2.771.639.560,00

Penambahan aset tak berwujud Tahun 2014 sebesar Rp197.110.600,00 yang merupakan pembelian/pengadaan piranti lunak (*software*) Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA SOFTWARE	SKPD	HARGA
1.	e – Perizinan (Upgrade)	Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	49.940.000,00
2.	Aplikasi Monitoring dan Analisis Pekerjaan (MAP GPS Basis)	Dinas Pekerjaan Umum	49.720.000,00
3.	Aplikasi SIMPATDA RETRIBUSI DAERAH	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	59.950.000,00
4.	OS Windows Server, OLP R2 with user Call + Media Kit Downgradeable	Bagian Hukum Setda	15.000.000,00
5.	OS Windows Server, OLP R2 with user Call + Media Kit Downgradeable	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	22.500.600,00
JUMLAH :			197.110.600,00

Nilai mutasi tahun 2014 berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Aset tak berwujud Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari :

No	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Software Aplikasi Finger Print Pegawai	49.750.000,00	49.750.000,00
2	Software Aplikasi Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	108.135.810,00	108.135.810,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
3	Software Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan	198.380.000,00	198.380.000,00
4	Software Aplikasi Billing System	214.500.000,00	214.500.000,00
5	Software dan Upgrade Design Website SKPD	348.987.000,00	348.987.000,00
6	Software Aplikasi Sistem Jaringan Data Informasi Hukum	94.750.000,00	94.750.000,00
7	Software Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	131.950.000,00	131.950.000,00
8	Software Aplikasi Penunjang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	56.850.000,00	56.850.000,00
9	Software Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan	149.840.000,00	149.840.000,00
10	Software Aplikasi Sistem Informasi Data Kependudukan	39.900.000,00	39.900.000,00
11	Software Aplikasi Penyusunan Kontrak Kinerja SKPD	49.373.500,00	49.373.500,00
12	Software Aplikasi Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	49.439.500,00	49.439.500,00
13	Software Aplikasi KUA PPAS Tahun 2011	39.600.000,00	39.600.000,00
14	Software Aplikasi Telecenter (Pembelajaran Masyarakat)	5.000.000,00	5.000.000,00
15	Software Aplikasi Sistem Informasi Musrenbang	39.995.000,00	39.995.000,00
16	Software Aplikasi Sistem Informasi Surat Menyurat dan Pengarsipan	112.440.000,00	112.440.000,00
17	Software Aplikasi Layanan Keluarga Miskin On Line (SILAGO)	32.175.000,00	32.175.000,00
18	Software Aplikasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan	9.592.000,00	9.592.000,00
19	Software Anti Virus	19.300.000,00	19.300.000,00
20	Software Aplikasi Pelayanan Publik dalam Bidang Perpustakaan	14.900.000,00	14.900.000,00
21	Software Statistik SPSS	250.000,00	250.000,00
22	Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	196.845.000,00	196.845.000,00
23	Software Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIM-PK)	31.515.000,00	31.515.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
24	Software Aplikasi Gaji / GDO	24.850.000,00	24.850.000,00
25	Software Aplikasi Update Kartu Gaji / NPWP	24.850.000,00	24.850.000,00
26	Software Komputer Windows Server	87.000.600,00	49.500.000,00
27	Software Sistem Aplikasi Pengelolaan Sarana BPHTB TA 2012	99.800.000,00	99.800.000,00
28	Software Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR)	49.850.000,00	49.850.000,00
29	Software Aplikasi Data Anggota KORPRI	34.980.000,00	34.980.000,00
30	Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (SIMKEL)	151.844.000,00	151.844.000,00
31	Software Aplikasi Data dan Informasi Jurnal dan Data Kontrak	19.950.000,00	19.950.000,00
32	Software Aplikasi Penunjang Data dan Pembayaran Rusunawa	19.980.000,00	19.980.000,00
33	Software Aplikasi Data dan Informasi Jasa Kontruksi	24.502.000,00	24.502.000,00
34	Software Audio Playlist	12.787.000,00	12.787.000,00
35	Software Aplikasi Backup Data (AI PBB Stream Backup)	7.040.000,00	7.040.000,00
36	Software Aplikasi E-Perizinan	99.935.000,00	49.995.000,00
37	Software Aplikasi Penatausahaan Bagian Hukum	38.720.000,00	38.720.000,00
38	Software Aplikasi Lomba Kadarkum	49.775.000,00	49.775.000,00
39	Software Aplikasi Sismatekum	79.750.000,00	79.750.000,00
40	Software Aplikasi Penyusunan Database Bappeda	39.998.750,00	39.998.750,00
41	Software Aplikasi Monitoring dan Analisis Pekerjaan (MAP GPS Basis)	49.720.000,00	0,00
42	Software Aplikasi Simpatda Retribusi Daerah	59.950.000,00	0,00
JUMLAH		2.968.750.160,00	2.771.639.560,00

2. Aset Lain-lain

Aset Lain – lain saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp10.788.953.321,00 dan Rp10.147.472.164,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Aset Lain – lain	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Saldo Awal	10.147.472.164,00	6.298.841.873,00
2	Penambahan Tahun 2014	690.242.749,00	3.848.630.291,00
3	Pengurangan Tahun 2014	48.761.592,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Aset Lain – lain	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
Jumlah	10.788.953.321,00	10.147.472.164,00

Saldo awal aset lain - lain Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.147.472.164,00 merupakan aset tetap yang rusak berat, sudah tidak ada atau tidak ditemukan barangnya dan yang diperuntukkan atau diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, sedangkan penambahan aset lain-lain sebesar Rp690.242.749,00 merupakan nilai koreksi aset yang telah dihibahkan kepada lembaga/masyarakat selama tahun 2014 sebesar Rp29.246.550,00 dan sisanya sebesar Rp660.996.199,00 adalah koreksi atas biaya perolehan aset dan administrasi proyek (AP) yang tidak dapat dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi selama tahun 2014 berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo yang belum diusulkan untuk penghapusan aset.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp48.761.592,00 adalah koreksi terhadap aset lainnya atas denda keterlambatan pelaksanaan beberapa pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga pada tahun 2013 dan baru terbayarkan pada tahun anggaran 2014.

Aset Lain - lain Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2014, terdiri dari :

No	Aset Lain – lain	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Aset Tetap yang rusak berat selama TA 2011 sebesar Rp244.612.330,00 yang terdiri dari : - Alat angkutan sebanyak dua buah. - Alat kedokteran sebanyak sembilan buah. - Alat laboratorium sebanyak satu buah. - Buku sebanyak 42 buah. Berita acara dan Keputusan Walikota Probolinggo belum ada.	6.800.000,00 149.040.500,00 80.000.000,00 8.771.830,00	6.800.000,00 149.040.500,00 80.000.000,00 8.771.830,00
2	Aset Tetap yang sudah tidak ada atau tidak ditemukan barangnya sesuai hasil inventarisasi oleh Bidang Aset DPPKA Kota Probolinggo selama TA 2011 sebesar Rp871.283.569,00, yang terdiri dari : - Alat kedokteran sebanyak 94 buah. - Alat laboratorium sebanyak 10 buah. - Buku perpustakaan sebanyak 5.239 buah. Berita acara dan Keputusan Walikota Probolinggo belum ada.	711.632.150,00 14.013.000,00 145.638.419,00	711.632.150,00 14.013.000,00 145.638.419,00
3	Aset Tetap yang diperuntukkan atau diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp8.740.769.023,00, yang terdiri dari : - Alat berat berupa mesin pencacah sampah pada Badan Lingkungan Hidup - Alat angkutan berupa gerobak sampah pengad. TA 2010, 2011 dan 2012. - Alat pertanian sebanyak 44 buah pada Dinas Pertanian. - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berupa Meubelair (meja, kursi, rak buku, papan tulis dan almari) untuk sekolah swasta pada Dinas	148.057.000,00 382.753.572,00 6.400.000,00 337.815.516,00	148.057.000,00 382.753.572,00 6.400.000,00 337.815.516,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Aset Lain – lain	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
	Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip.		
-	Alat kedokteran berupa sebanyak 9 unit pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.	84.620.000,00	84.620.000,00
-	Alat laboratorium sebanyak 10 unit pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.	34.650.000,00	34.650.000,00
-	Gedung sekolah dan rehabilitasinya untuk sekolah swasta pada Dinas Pendidikan.	3.163.302.750,00	3.163.302.750,00
-	Gedung Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) "Sinar Harapan".	250.000.000,00	250.000.000,00
-	Bangunan rumah kompos pada Badan Lingkungan Hidup.	195.970.000,00	195.970.000,00
-	Hewan ternak pada Dinas Pertanian.	448.440.000,00	448.440.000,00
-	Alat Peraga / Praktek Sekolah SMP untuk Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan.	254.907.096,00	254.907.096,00
-	Bangunan Air (Irigasi) berupa Sumur dan lubang resapan biopori pada Badan Lingkungan Hidup.	375.442.580,00	375.442.580,00
-	Instalasi Biogas Aerob pada Badan Lingkungan Hidup.	21.823.000,00	21.823.000,00
-	Bangunan instalasi air minum (tandon air), rehabilitasi tempat ibadah masyarakat, bangunan MCK++ dan pavingisasi pada lembaga PAUD.	2.996.174.359,00	2.996.174.359,00
-	Buku perpustakaan sebanyak 46 buah pada Kantor Perpustakaan dan Arsip.	11.166.600,00	11.166.600,00
-	Komposter Aerob dan Bak Pengomposan pada Badan Lingkungan Hidup.	14.402.050,00	0,00
-	3 unit laptop untuk pemenang lomba kreasi maskot pemda pada Diskominfo.	14.844.500,00	0,00
	Aset Tetap yang diperuntukkan atau diserahkan kepada pihak ketiga tersebut secara keseluruhan telah ada akta hibahnya, namun belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo.		
4	Koreksi aset tetap terhadap biaya perolehan aset yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo.	829.013.399,00	168.017.200,00
5	Denda keterlambatan pelaksanaan proyek atas beberapa pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum yang sampai dengan per 31 Desember 2013 belum dibayar oleh Pihak Ketiga	0,00	48.761.592,00
6	Pembongkaran Bangunan Gedung Pustu Kelurahan Pakistaji yang belum diusulkan penghapusan oleh Pemerintah Kota Probolinggo	103.275.000,00	103.275.000,00
	JUMLAH	10.788.953.321,00	10.147.472.164,00

**i. KEWAJIBAN****1) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban ini saldo tahun 2014 dan 2013, masing-masing sebesar Rp5.495.373.568,91 dan Rp3.519.467.351,02 dapat dirinci sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
b) Utang Bunga	0,00	0,00
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
d) Pendapatan Diterima Dimuka	377.082.238,00	261.797.675,00
e) Hutang Jangka Pendek Lainnya	5.118.291.330,91	3.257.669.676,02
Jumlah	5.495.373.568,91	3.519.467.351,02

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.725.856.543,91 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Sewa Tanah Eks Bengkok	377.082.238,00	261.797.675,00
Jumlah	377.082.238,00	261.797.675,00

b. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Dinas Kesehatan	0,00	280.500.000,00
2) RSUD	3.256.180.895,91	2.873.287.516,02
3) Dinas Perhubungan	106.517.025,00	11.288.750,00
4) Dinas Kelautan dan Perikanan	92.593.410,00	92.593.410,00
5) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.663.000.000,00	0,00
Jumlah	5.118.291.330,91	3.257.669.676,02

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hutang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Kesehatan

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Dinas Kesehatan	0,00	280.500.000,00
Jumlah	0,00	280.500.000,00

Saldo hutang jangka pendek lainnya tahun 2013 sebesar Rp280.500.000,00 merupakan hutang kepada PT. Primera Adi Perkasa atas pengadaan Alat Radiologi dan Perijinannya sesuai dengan dokumen kontrak nomor :



027/119.j/425.102/SPJ/RO/2013 tanggal 8 Nopember 2013 sumber dana DBHCHT yang sampai per 31 Desember 2013 belum terbayar. Dan berdasarkan surat kesepakatan penundaan pembayaran nomor :900/0108/425.102/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akhirnya telah dibayarkan oleh pemerintah kota probolinggo pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan bukti SP2D nomor : 16368/SP2D-LS/1.02.01.01/2014.

2. Hutang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) RSUD	3.256.180.895,91	2.873.287.516,02
Jumlah	3.256.180.895,91	2.873.287.516,02

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.256.180.895,91 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Hutang Jangka Pendek RSUD	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
1	Bina Usaha Mandiri	33.000.000,00	33.000.000,00
2	CV. Gama Denta	0,00	4.526.280,00
3	CV. Karya Surya Medika	1.790.415,00	1.790.415,00
4	CV. Citra Abadi	0,00	244.530,00
5	CV. Midigrow	0,00	41.372.239,00
6	CV. Mitra Karya	0,00	73.146.639,50
7	Delta Mandiri	1.352.890,00	1.352.890,00
8	Indofarma	33.129.870,00	18.533.868,00
9	MB Citra Medika	95.028.175,00	81.890.600,00
10	Megah Medika	12.342.000,00	29.172.000,00
11	Mitra Sarana Alkesindo	14.605.800,00	12.749.275,00
12	Perdana Bina Sukses	27.519.965,00	19.032.940,00
13	PT. Agesa Pijar	0,00	18.920.000,00
14	PT. Antar Mitra Sembada	19.652.684,00	50.533.115,00
15	PT. Anugerah Argon Medica	146.739.860,59	139.416.313,00
16	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	224.511.360,40	137.431.052,00
17	PT. Bina San Prima	387.648.458,21	261.938.121,00
18	PT. Citra Marga Nusa Bakti	37.497.405,00	54.005.875,00
19	PT. Darmawangsa Medical Supplies	124.628.361,00	206.021.695,00
20	PT. Daya Anugrah Dewasakti	50.548.633,20	26.528.872,00
21	PT. Dexa Arfindo Pratama	77.019.893,00	32.562.750,00
22	PT. Dos Ni Roha	198.121.799,10	36.949.865,00
23	PT. Enseval Putra Megatrading Tbk.	372.953.530,19	264.444.329,42
24	PT. Global Selaras	0,00	18.425.000,00
25	PT. Intisumber Hasil Sempurna	143.772.705,75	174.446.084,00
26	PT. Kalista Prima	213.404.950,00	147.339.630,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

No	Hutang Jangka Pendek RSUD	31 Desember 2014	31 Desember 2013
		Rp	Rp
27	PT. Kebayoran Pharma	3.896.743,00	37.119.764,00
28	PT. Kimia Farma	42.560.674,50	47.222.507,00
29	PT. Mensa Bina Sukses	32.361.459,94	60.189.408,46
30	PT. Merapi Utama Pharma	39.715.434,00	127.122.577,00
31	PT. Millenium Pharmacon International Tbk.	43.751.989,50	123.864.388,60
32	PT. Parazelzus Indonesia	99.340.802,00	4.644.166,00
33	PT. Parit Padang	116.019.538,89	40.536.399,30
34	PT. Penta Valent	91.790.593,79	81.167.931,49
35	PT. Saba Indomedika	40.189.187,00	20.760.713,00
36	PT. Sawah Besar Farma	12.587.025,00	3.931.062,00
37	PT. Sentra Asia Gemilang	84.514.909,00	170.317.400,00
38	PT. United Dico Citas	23.459.256,00	2.911.438,00
39	Rajawali	64.105.053,85	132.780.463,25
40	Sandana Multi Gas	126.816.250,00	79.035.000,00
41	Syahid Husada	5.867.565,00	51.157.920,00
42	Wahana Gumilang	68.175.800,00	4.752.000,00
43	Distriversa	6.050.000,00	0,00
44	PT. Daya Muda Agung	7.167.600,00	0,00
45	PT. Pandimas Sentosa	11.388.201,00	0,00
46	PT. Rania Surya Perdana	118.224.058,00	0,00
47	PT. Tempo	2.930.000,00	0,00
JUMLAH		3.256.180.895,91	2.873.287.516,02

3. Hutang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Perhubungan

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Dinas Perhubungan	106.517.025,00	11.288.750,00
Jumlah	106.517.025,00	11.288.750,00

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2014 sebesar Rp106.517.025,00 merupakan hutang belanja Jasa Sharing Parkir Berlangganan Tahun 2014 yang terdiri dari utang kepada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp60.205.275,00, utang kepada Polres Jawa Timur sebesar Rp23.155.875,00 dan utang kepada Tim Intensif Dinas Perhubungan sebesar Rp23.155.875,00.

4. Hutang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Dinas Kelautan dan Perikanan	92.593.410,00	92.593.410,00
Jumlah	92.593.410,00	92.593.410,00



Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2014 sebesar Rp92.593.410,00 merupakan hutang belanja modal untuk pekerjaan pagar los pasar ikan yang sejak tahun 2012 belum dibayarkan kepada rekanan CV. Ilham. Selanjutnya biaya pelunasan pembayaran pekerjaan pagar los pasar ikan tersebut dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah membayar kewajiban kepada CV. Ilham pada tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana bukti pembayaran SP2D nomor :00365/SPP-LS/2.05.01.01/2015.

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.663.000.000,00	0,00
Jumlah	1.663.000.000,00	0,00

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.663.000.000,00 merupakan hutang pengembalian realisasi Bantuan Keuangan Provinsi yang tidak digunakan selama tahun 2014.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2014, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

g. **EKUITAS DANA**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.794.504.398.303,75 mengalami peningkatan kekayaan bersih sebesar Rp187.340.259.289,78 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.607.164.139.013,97. Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 terdiri atas:

Ekuitas Dana	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a Ekuitas Dana Lancar	189.356.623.391,64	102.003.926.702,19
b Ekuitas Dana Investasi	1.605.147.774.912,11	1.505.160.212.311,78
c Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah	1.794.504.398.303,75	1.607.164.139.013,97

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	168.726.465.702,29	74.913.283.602,46

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b	Pendapatan yang Ditangguhkan	32.396.812,00	114.068.500,00
c	Cadangan Piutang	19.321.342.393,96	25.627.202.932,45
d	Cadangan Persediaan	6.771.792.052,30	4.868.839.018,30
e	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	(5.495.373.568,91)	(3.519.467.351,02)
Jumlah		189.356.623.391,64	102.003.926.702,19

b. Ekuitas Dana Investasi

Saldo Eukitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	14.034.247.117,67	18.208.417.416,16
b Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.577.355.824.313,44	1.474.032.683.171,62
c Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	13.757.703.481,00	12.919.111.724,00
Jumlah	1.605.147.774.912,11	1.505.160.212.311,78

c. Ekuitas Dana Cadangan

Saldo Eukitas Dana Cadangan per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana Cadangan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
a Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.2. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**A. PENDAPATAN**

Pendapatan Kota Probolinggo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2014 sebagai berikut realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan Daerah :		Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang
					2014
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pendapatan Asli Daerah.	101.459.544.753,37	135.062.805.887,61	133,12%	33.603.261.134,24
2.	Pendapatan Transfer	677.759.271.080,00	683.362.100.310,00	100,83%	5.602.829.230,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	54.384.708.000,00	54.390.858.000,00	100,01%	6.150.000,00
Jumlah		833.603.523.833,37	872.815.764.197,61	104,70%	39.212.240.364,24

1. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2014 dengan rincian sebagai berikut:



Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a. Pendapatan Pajak Daerah	20.546.500.000,00	24.457.670.693,00	119,04%	3.911.170.693,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	11.786.169.350,00	15.330.543.060,00	130,07%	3.544.373.710,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	762.559.815,47	762.559.815,47	100,00%	0,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	68.364.315.587,90	94.512.032.319,00	138,25%	26.147.716.731,10
Jumlah	101.459.544.753,37	135.062.805.887,47	133,12%	33.603.261.134,10

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah TA 2014 sebesar Rp101.459.544.753,37 terealisasi sebesar Rp135.062.805.887,47 atau 133,12% yang berarti melampaui target sebesar Rp33.603.261.134,10.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2014 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. **Pendapatan Pajak Daerah**

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014, sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah :

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Pajak Hotel	456.500.000,00	580.622.427,00	127,19%	124.122.427,00
2 Pajak Restoran	1.570.000.000,00	2.131.583.570,00	135,77%	561.583.570,00
3 Pajak Hiburan	350.000.000,00	432.760.952,00	123,65%	82.760.952,00
4 Pajak Reklame.	815.000.000,00	861.011.615,00	105,65%	46.011.615,00
5 Pajak Penerangan Jalan	8.820.000.000,00	10.302.440.933,00	116,81%	1.482.440.933,00
6 Pajak Parkir	45.000.000,00	54.382.000,00	120,85%	9.382.000,00
7 Pajak Air Bawah Tanah	290.000.000,00	326.406.507,00	112,55%	36.406.507,00
8 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.500.000.000,00	5.736.612.050,00	104,30%	236.612.050,00
9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.700.000.000,00	4.031.850.639,00	149,33%	1.331.850.639,00
Jumlah	20.546.500.000,00	24.457.670.693,00	119,04%	3.911.170.693,00

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan, pengakuan atas pendapatan disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD. Pajak Daerah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau bukti transaksi penerimaan pendapatan lainnya yang setara. Pendapatan Pajak daerah diakui pada saat diterima RKUD.

Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2014 sebesar Rp20.546.500.000,00 terealisasi sebesar Rp24.457.670.693,00 atau 119,04%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.736.612.050,00 atau 104,30%.

b. **Pendapatan Retribusi Daerah**

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2014 sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) Retribusi Jasa Umum.	6.031.375.000,00	9.747.082.223,00	161,61%	3.715.707.223,00
2) Retribusi Jasa Usaha.	4.238.007.600,00	4.039.389.930,00	95,31%	(198.617.670,00)
3) Retribusi Perijinan Tertentu	1.516.786.750,00	1.544.070.907,00	101,80%	27.284.157,00
Jumlah Retribusi Daerah	11.786.169.350,00	15.330.543.060,00	130,07%	3.544.373.710,00

Dari Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2014 sebesar Rp11.786.169.350,00 terealisasi sebesar Rp15.330.543.060,00 atau 130,07%.

Masing-masing realisasi pendapatan retribusi pendapatan daerah TA 2014 dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan	477.400.000,00	3.788.744.875,00	793,62%	3.311.344.875,00
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	144.000.000,00	131.550.000,00	91,35%	(12.450.000,00)
c) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	36.535.000,00	43.095.000,00	117,96%	6.560.000,00
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	41.750.000,00	29.560.000,00	70,80%	(12.190.000,00)
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.512.000.000,00	3.859.393.250,00	109,89%	347.393.250,00
f) Retribusi Pelayanan Pasar	921.690.000,00	920.668.250,00	99,89%	(1.021.750,00)
g) Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	578.000.000,00	683.697.500,00	118,29%	105.697.500,00
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	9.573.000,00	63,82%	(5.427.000,00)
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	50.000.000,00	28.717.348,00	57,43%	(21.282.652,00)
j) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	68.535.000,00	85,67%	(11.465.000,00)
k) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	175.000.000,00	183.548.000,00	104,88%	8.548.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	6.031.375.000,00	9.747.082.223,00	161,61%	3.715.707.223,00

Dari anggaran penerimaan jasa umum TA 2014 sebesar Rp6.031.375.000,00 terealisasi sebesar Rp9.747.082.223,00 atau 161,61%. Penerimaan retribusi jasa umum TA 2014 yang tidak mencapai target anggaran antara lain jasa pelayanan persampahan/kebersihan, jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, jasa pelayanan pasar, jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, jasa penggantian biaya cetak peta, jasa penyediaan atau penyedotan kakus dan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:



Retribusi Jasa Usaha :

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.527.378.600,00	2.507.142.725,00	99,20%	(20.235.875,00)
b) Retribusi Tempat Pelelangan	390.000.000,00	466.812.905,00	119,70%	76.812.905,00
c) Retribusi Terminal.	325.481.000,00	257.636.300,00	79,16%	(67.844.700,00)
d) Retribusi Rumah Potong Hewan	65.148.000,00	51.047.000,00	78,36%	(14.101.000,00)
e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	930.000.000,00	756.751.000,00	81,37%	(173.249.000,00)
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	4.238.007.600,00	4.039.389.930,00	95,31%	(198.617.670,00)

Dari anggaran penerimaan jasa usaha sebesar Rp4.238.007.600,00 terealisasi sebesar Rp4.039.389.930,00 atau 95,31%. Penerimaan retribusi jasa usaha TA 2014 yang tidak mencapai target anggaran antara lain jasa pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa rumah potong hewan dan jasa tempat rekreasi dan olah raga. Realisasi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp2.507.142.725,00 berasal dari Sewa Bedak, Tanah Kering, Tanah Eks bengkok, Bangunan Permanen, Bangunan Sewa Reklame, Rumah Dinas, PKL, Rusunawa, Wales, Alat Laboratorium, Tabung PMK, Steplan, Bee Jay (Fantasy Land), Bus, Band, Gedung, Tenda, Kursi, Sound Sistem, Area Parkir PPI dan Kios Buah. Untuk Retribusi Fantasy Land sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan CV. Beejay Sarana Hiburan Nomor : 660/83/425.205/2011 Tentang Penyediaan Sarana Hiburan Permainan Anak – Anak (fantasy Land). Untuk Pendapatan Retribusi Parkir PPI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo dengan CV. Diva Alpin Probolinggo tentang Pengelolaan Parkir di Areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Probolinggo dengan nomor : 134.5/398/425.011/2014 dan Nomor : ALPIN 023/1310/II/2014.

3) Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dan dapat dirinci sebagai berikut.

Retribusi Perijinan Tertentu :

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	679.985.000,00	576.149.457,00	84,73%	(103.835.543,00)
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	11.500.000,00	115,00%	1.500.000,00
c) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.	475.000.000,00	409.960.650,00	86,31%	(65.039.350,00)
d) Retribusi Izin Trayek	20.400.000,00	19.000.000,00	93,14%	(1.400.000,00)
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000,00	4.040.000,00	269,33%	2.540.000,00
f) Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang	49.901.750,00	53.778.000,00	107,77%	3.876.250,00
g) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	280.000.000,00	469.642.800,00	167,73%	189.642.800,00
Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu	1.516.786.750,00	1.544.070.907,00	101,80%	27.284.157,00

Anggaran Penerimaan retribusi perijinan tertentuTA 2014 sebesar Rp1.516.786.750,00 terealisasi sebesar Rp1.544.070.907,00atau 101,80%. Penerimaan retribusi jasa tertentu



TA 2014 yang tidak mencapai target anggaran antara lain : jasa retribusi izin mendirikan bangunan, jasa retribusi izin gangguan/keramaian dan jasa retribusi izin trayek.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Probolinggo pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo dengan realisasi TA 2014 sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) PT. BANK JATIM	706.529.815,47	706.529.815,47	100,00%	0,00
2) PT. BPR JATIM	56.030.000,00	56.030.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	762.559.815,47	762.559.815,47	100,00%	0,00

Target anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2014 sebesar Rp762.559.815,47 terealisasi sebesar Rp762.559.815,47 atau 100,00%.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain – lain PAD Yang Sah untuk periode TA 2014 dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	999.592.000	947.194.140,00	94,76%	(52.397.860,00)
2 Pendapatan Penerimaan Jasa Giro	800.000.000,00	961.645.041,05	120,21%	161.645.041,05
3 Pendapatan Bunga Deposito	5.000.000.000,00	10.572.848.633,45	211,46%	5.572.848.633,45
4 Pendapatan Denda Pajak	11.000.000,00	13.526.440,00	122,97%	2.526.440,00
5 Pendapatan Denda Retribusi	23.205.000,00	37.149.680,00	160,09%	13.944.680,00
6 Pendapatan dari Pengembalian	2.990.679.547,26	1.536.493.662,51	51,38%	(1.454.185.884,75)
7 Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	325.100.000,00	381.070.527,00	117,22%	55.970.527,00
8 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat	245.000.000,00	229.040.360,54	93,49%	(15.959.639,46)
9 Pendapatan dari BLUD	50.699.502.040,64	75.441.050.834,59	148,80%	24.741.548.793,95
10 Pendapatan dari Kegiatan Pasar Murah	73.765.000,00	76.405.000,00	103,58%	2.640.000,00
11 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	7.196.472.000,00	4.315.608.000,00	59,97%	(2.880.864.000,00)
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	68.364.315.587,90	94.512.032.319,14	138,25%	26.147.716.731,24

Target anggaran lain – lain PAD yang sah sebesar Rp68.364.315.587,90 terealisasi sebesar Rp94.512.032.319,14 atau 138,25%.

Pendapatan dari Pengembalian adalah akun jenis pendapatan dengan rincian Pendapatan dari Kontra Pos untuk mencatat pendapatan dari penerimaan denda keterlambatan pekerjaan, penerimaan penghapusan/penjualan kendaraan, setor kembali kegiatan – kegiatan tahun – tahun sebelumnya, ganti rugi kehilangan kendaraan roda 2 dan 4, tindak



lanjut ganti rugi atas temuan pemeriksaan BPK dan lain – lain. Pendapatan dari Pengembalian tidak terkait dengan saldo kas di Bendahara Pengeluaran.

Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.536.493.662,51 terdiri dari :

No	Keterangan	Realisasi 2014
1.	Penerimaan Denda Keterlambatan Pekerjaan	127.056.311,02
2.	Setor Kembali Kegiatan Tahun – Tahun Sebelumnya	231.715.964,15
3.	Ganti Rugi Kehilangan Kendaraan Roda 2 dan 4	964.175,00
4.	Tindak Lanjut Ganti Rugi atas Temuan Pemeriksaan BPK	14.398.649,00
5.	Tindak Lanjut Ganti Rugi atas Temuan Pemeriksaan Inspektorat	19.893.750,00
6.	Bagi Hasil Retribusi Hewan	2.760.000,00
7.	Penerimaan Pelunasan Pemberian Pinjaman Uang Muka Pembelian Rumah kepada PNS	105.253.882,00
8.	Pengembalian Potongan Kelebihan Pemberian Tunjangan PNS	29.550.482,00
9.	Klaim Asuransi PT. Asuransi Jasa Indonesia	52.286.052,00
10.	Contra Pos Lain-Lain	409.526.347,34
11.	Penerimaan dari World Health Organization (WHO)	508.287.050,00
12.	Raskin	34.801.000,00
	JUMLAH	1.536.493.662,51

Pada Tahun 2014 berdasarkan referensi WHO no. P02010942501 dan Nota Kredit Bank Jatim no. 318 tanggal 14 Nopember 2014, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan transfer dana bantuan dari World Health Organization (WHO) sebesar Rp.508.287.050,00, dana tersebut sedianya digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pasar Sehat Percontohan di Kota Probolinggo dengan peruntukan berupa kegiatan Lokakarya advokasi Pasar Sehat Percontohan, Pelatihan Participatory Hygiene and Sanitation Transformation, Implementasi Participatory Hygiene and Sanitation Transformation dan Workshop Regional Jawa.

Kegiatan Pasar Sehat Percontohan di Kota Probolinggo tersebut sedianya akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan Nopember 2014, namun kegiatan tersebut akhirnya tidak dapat direalisasikan karena terhambat proses pencairan dana dari WHO yang baru ditransfer pada 14 Nopember 2014 ketika penyusunan dan pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 telah selesai, sehingga kegiatan tersebut akhirnya dianggarkan pada APBD Tahun 2015.

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a. Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan	532.402.904.335,00	532.707.444.981,00	100,06%	304.540.646,00
b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya	86.059.278.000,00	86.059.278.000,00	100,00%	0,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi	59.297.088.745,00	64.595.377.329,00	108,94%	5.298.288.584,00
Jumlah Pendapatan Transfer	677.759.271.080,00	683.362.100.310,00	100,83%	5.602.829.230,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Probolinggo untuk periode TA 2014 dengan rincian sebagai berikut:



	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) Dana Bagi Hasil Pajak	30.490.908.591,00	32.596.477.462,00	106,91%	2.105.568.871,00
2) Dana Bagi Hasil SDA	15.059.189.744,00	21.419.313.519,00	142,23%	6.360.123.775,00
3) Dana Alokasi Umum.	454.208.196.000,00	454.208.196.000,00	100,00%	0,00
4) Dana Alokasi Khusus	32.644.610.000,00	24.483.458.000,00	75,00%	(8.161.152.000,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	532.402.904.335,00	532.707.444.981,00	100,06%	304.540.646,00

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kota Probolinggo untuk periode TA 2014. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah PMK Nomor 77/PMK.07/2014. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah PMK Nomor 202/PMK.07/2013. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah PMK Nomor 216/PMK.07/2014. Dana Bagi Hasil Pajak dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.810.289.504,00	11.010.899.843,00	124,98%	2.200.610.339,00
Bagi Hasil dari PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib				
b) Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	12.189.450.545,00	11.606.676.392,00	0,00%	(582.774.153,00)
c) Bagi Hasil Cukai Tembakau	9.491.168.542,00	9.978.901.227,00	105,14%	487.732.685,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	30.490.908.591,00	32.596.477.462,00	106,91%	2.105.568.871,00

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2014 dan 2013. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi adalah PMK Nomor 83/PMK.07/2014. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Iuran Hak Pengusahaan Hutan adalah PMK Nomor 235/PMK.07/2014. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Pungutan Hasil Perikanan adalah PMK Nomor 233/PMK.07/2014. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi adalah PMK Nomor 230/PMK.07/2014. Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk bagi Hasil Pertambangan Umum adalah PMK Nomor 232/PMK.07/2014. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	295.366.783,00	323.215.213,00	109,43%	27.848.430,00
b) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	329.030.883,00	383.182.410,00	116,46%	54.151.527,00
c) bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	14.385.076.500,00	20.658.674.618,00	143,61%	6.273.598.118,00
d) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	49.715.578,00	54.241.278,00	109,10%	4.525.700,00
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya alam	15.059.189.744,00	21.419.313.519,00	142,23%	6.360.123.775,00

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode TA 2014. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2014. Dana Alokasi Umum dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
Dana Alokasi Umum	454.208.196.000,00	454.208.196.000,00	100,00%	0,00
Jumlah	454.208.196.000,00	454.208.196.000,00	100,00%	0,00

4) Dana Alokasi Khusus

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
Dana Alokasi Khusus	32.644.610.000,00	24.483.458.000,00	75,00%	(8.161.152.000,00)
Jumlah	32.644.610.000,00	24.483.458.000,00	75,00%	(8.161.152.000,00)

- b. Target penerimaan DAK Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp32.644.610.000,00. Dasar pengalokasian DAK adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014. Dari target penerimaan tersebut hanya tersalur/tertransfer sebesar Rp24.483.458.000,00 atau 75%. Pentransferan tersebut terdiri dari transfer tahap I sebesar Rp9.793.383.000,00 dan tahap II sebesar Rp14.690.075.000,00. Transfer tahap III sebesar Rp8.161.152.000,00 tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Hal ini disebabkan karena penyerapan/realisasi belanja untuk transfer tahap III tidak memenuhi persyaratan. Realisasi belanja tidak mencapai 90% dari dana yang sudah ditransfer. Persyaratan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kota Probolinggo untuk periode TA 2014 dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) Dana Penyesuaian	86.059.278.000,00	86.059.278.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	86.059.278.000,00	86.059.278.000,00	100,00%	0,00

Dari anggaran penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2014 sebesar Rp86.059.278.000,00 terealisasi sebesar Rp86.059.278.000,00 atau 100,00%. Dasar pengalokasian Dana Penyesuaian untuk Tambahan Penghasilan Guru PNSD dengan PMK Nomor 61/PMK.07/2014 dan Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan PMK Nomor 101/PMK.07/2013.

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00%	0,00
2 Tunjangan Profesi Guru PNSD	86.059.278.000,00	86.059.278.000,00	100,00%	0,00
Jumlah	86.059.278.000,00	86.059.278.000,00	100,00%	0,00

d. Transfer Pemerintah Provinsi

Penerimaan Transfer - Pemerintah Provinsi yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Probolinggo meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2014 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo dilaporkan sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.297.088.745,00	64.595.377.329,00	108,94%	5.298.288.584,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	59.297.088.745,00	64.595.377.329,00	108,94%	5.298.288.584,00

Target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi TA 2014 sebesar Rp59.297.088.745,00 terealisasi sebesar Rp64.595.377.329,00 atau 108,94%. Dasar pengalokasian Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Sumbangan Pihak Ketiga dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/261/KPTS/013/2014 dan Nomor 188/614/KPTS/013/2014.

Penerimaan Transfer ini dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.885.732.719,00	19.182.164.959,00	96,46%	(703.567.760,00)
b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.007.145.795,00	14.744.135.740,00	98,25%	(263.010.055,00)
c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.248.802.471,00	17.403.923.319,00	95,37%	(844.879.152,00)
d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	240.932.026,00	263.410.094,00	109,33%	22.478.068,00
e) Bagi Hasil Pajak Rokok	5.000.000.000,00	12.725.997.580,00	254,52%	7.725.997.580,00
f) Bagi Hasil Retribusi Penerimaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (RP3HH)	880.525.179,00	264.157.554,00	30,00%	(616.367.625,00)
g) Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	33.950.555,00	11.588.083,00	34,13%	(22.362.472,00)
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	59.297.088.745,00	64.595.377.329,00	108,94%	5.298.288.584,00

2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Pendapatan Lainnya	54.384.708.000,00	54.384.708.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	54.384.708.000,00	54.384.708.000,00	100,00%	0,00

Dari anggaran penerimaan lain – lain pendapatan yang sah TA 2014 sebesar Rp54.384.708.000,00 terealisasi sebesar Rp54.384.708.000,00 atau 100,00%.

Penerimaan Lainnya dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a) Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	32.441.347.000,00	32.447.497.000,00	100,02%	6.150.000,00
b) Dana Insentif Daerah	21.943.361.000,00	21.943.361.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	54.384.708.000,00	54.390.858.000,00	100,01%	6.150.000,00

a) Dasar pengalokasian Pendapatan Lainnya untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.450/202/2013 tanggal 17 Desember 2014 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur Tahun 2014, digunakan untuk kegiatan:

1. Peningkatan Pendidikan:

- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebesar Rp1.155.000.000,00;
- BOP MADIN sebesar Rp76.000.000,00;
- BKSM Jenjang SLTA sebesar Rp468.000.000,00;
- Community College*/Akademi Komunitas (AK)/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) sebesar Rp40.000.000,00;
- Kantin Kejujuran TK/SD dan PK sebesar Rp7.405.000,00;
- Kantin Kejujuran SMP dan SMA sebesar Rp10.000.000,00;



- g. Peningkatan Mutu Pendidikan SMK sebesar Rp500.000.000,00;
 - h. Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi sebesar Rp7.500.000,00;
 - i. Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebesar Rp20.000.000,00;
 - j. Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi sebesar Rp15.000.000,00.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan:
- a. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus sebesar Rp18.450.000,00;
 - b. Pengembangan Taman Posyandu sebesar Rp40.392.000,00;
 - c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Balita Gizi Buruk sebesar Rp33.600.000,00;
 - d. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo sebesar Rp5.000.000.000,00
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur:
Sarana dan Prasarana Infrastruktur sebesar Rp25.000.000.000,00.
4. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 69 Tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00
- b) Dasar pengalokasian Pendapatan Lainnya untuk Dana Insentif Daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 8/PMK.07/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang pedoman umum dan alokasi dana insentif daerah tahun anggaran 2014

B. BELANJA

Belanja Daerah Kota Probolinggo pada periode Tahun Anggaran 2014 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo TA 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1. Belanja Operasi	761.934.987.263,78	670.299.509.257,25	87,97%	(91.635.478.006,53)
2. Belanja Modal	141.331.820.172,05	106.923.357.838,72	75,65%	(34.408.462.333,33)
3. Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	1.031.236.512,00	22,92%	(3.468.763.488,00)
Jumlah Belanja	907.766.807.435,83	778.254.103.607,97	85,73%	(129.512.703.827,86)

Dari anggaran belanja daerah TA 2014 sebesar Rp907.766.807.435,83 terealisasi sebesar Rp778.254.103.607,97 atau 85,73% dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Kota Probolinggo dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2014 sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a. Belanja Pegawai	472.793.284.111,40	422.615.706.461,00	89,39%	50.177.577.650,40
b. Belanja Barang	251.277.128.679,38	230.610.989.994,25	91,78%	20.666.138.685,13
c. Bunga	0,00	0,00	0,00%	0,00
d. Subsidi	0,00	0,00	0,00%	0,00
e. Hibah	29.652.250.000,00	12.223.966.000,00	41,22%	17.428.284.000,00
f. Bantuan Sosial	7.544.500.000,00	4.205.450.000,00	55,74%	3.339.050.000,00
g. Bantuan Keuangan	667.824.473,00	643.396.802,00	96,34%	24.427.671,00
Jumlah Belanja Operasi	761.934.987.263,78	670.299.509.257,25	87,97%	91.635.478.006,53

Dari anggaran belanja operasi TA 2014 sebesar Rp761.934.987.263,78 teralisasi sebesar Rp670.299.509.257,25 atau 87,97%. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Pajak, Insentif Pemungutan Retribusi, Honorarium PNS dan Non PNS, serta Uang Lembur dengan rincian anggaran dan realisasi TA 2014 sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Gaji dan Tunjangan	270.697.892.512,68	245.207.138.023,00	90,58%	(25.490.754.489,68)
2 Tambahan Penghasilan PNS	120.861.045.920,08	90.538.634.281,00	74,91%	(30.322.411.639,08)
3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.912.000.000,00	1.895.083.500,00	99,12%	(16.916.500,00)
4 Biaya Pemungutan Pajak daerah	947.600.000,00	552.288.368,00	58,28%	(395.311.632,00)
5 Insentif Pemungutan Pajak	1.630.000.000,00	851.246.578,00	52,22%	(778.753.422,00)
6 Insentif Pemungutan Retribusi	858.950.986,00	271.418.512,00	31,60%	(587.532.474,00)
7 Honorarium PNS	31.873.021.380,64	40.110.411.211,00	125,84%	8.237.389.830,36
8 Honorarium Non PNS	37.043.748.007,00	37.088.371.838,00	100,12%	44.623.831,00
9 Uang Lembur	6.969.025.305,00	6.101.114.150,00	87,55%	(867.911.155,00)
Jumlah Belanja Pegawai	472.793.284.111,40	422.615.706.461,00	89,39%	50.177.577.650,40

Dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp472.793.284.111,40 terealisasi sebesar Rp422.615.706.461,00 atau 89,39%. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi pelampauan belanja pada rekening Belanja Honorarium PNS sebesar Rp8.237.389.830,36 dan Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp44.623.831,00, dikarenakan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/309/KEP/425.012/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo dan berdasarkan surat keputusan ini RSUD mempunyai wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Pada tahun 2014, jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan pada RSUD meningkat, sehingga Pendapatan BLUD meningkat yang mempengaruhi Belanja Pegawai pada rekening Honorarium PNS dan



Honorarium Non PNS Jasa Medis juga meningkat. Sehingga belanja pegawai melampaui pagu anggaran yang telah dialokasikan pada awal tahun.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan kelompok belanja langsung dengan anggaran dan realisasi TA 2014 sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.041.366.395,21	25.564.591.737,00	102,09%	(523.225.341,79)
2 Belanja Bahan/ Material	24.655.557.618,45	27.814.923.968,00	112,81%	(3.159.366.349,55)
3 Belanja Jasa Kantor	53.119.196.316,00	46.249.888.177,00	87,07%	6.869.308.139,00
4 Belanja Premi Asuransi	926.812.000,00	695.638.906,00	75,06%	231.173.094,00
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.887.996.270,00	3.567.585.793,00	91,76%	320.410.477,00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan	12.427.890.415,00	11.121.938.538,00	89,49%	1.305.951.877,00
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.122.810.000,00	744.213.870,00	66,28%	378.596.130,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	882.754.000,00	641.464.500,00	72,67%	241.289.500,00
9 Belanja Sewa Alat Berat	40.046.400,00	40.046.400,00	100,00%	0,00
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.440.305.500,00	2.144.517.550,00	87,88%	295.787.950,00
11 Belanja Makanan dan Minuman	22.798.709.553,00	20.506.921.543,00	89,95%	2.291.788.010,00
12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.535.373.000,00	1.487.748.050,00	96,90%	47.624.950,00
13 Belanja Pakaian Kerja	662.000.000,00	641.789.950,00	96,95%	20.210.050,00
14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	3.793.088.750,00	3.581.029.850,00	94,41%	212.058.900,00
15 Belanja Perjalanan Dinas	36.723.789.740,00	32.779.559.277,00	89,26%	3.944.230.463,00
16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,00
17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	1.565.181.500,00	1.240.179.900,00	79,24%	325.001.600,00
18 Belanja Pemeliharaan	18.551.281.526,00	16.735.810.274,00	90,21%	1.815.471.252,00
19 Belanja Jasa Konsultasi	6.117.918.290,00	5.525.965.900,00	90,32%	591.952.390,00
20 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	33.321.903.905,72	28.106.577.651,25	84,35%	5.215.326.254,47
21 Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat	301.297.500,00	282.673.660,00	93,82%	18.623.840,00
22 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.325.850.000,00	1.101.924.500,00	83,11%	223.925.500,00
23 Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Belanja Barang	251.277.128.679,38	230.610.989.994,25	91,78%	20.666.138.685,13

Dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp251.277.128.679,38 terealisasi sebesar Rp230.610.989.994,25 atau 91,78%. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi pelampauan belanja pada rekening Belanja Bahan Pakai Habis Kantor sebesar Rp523.225.341,79 dan Belanja Bahan Material sebesar Rp3.159.366.349,55 dikarenakan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/309/KEP/425.012/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo dan berdasarkan surat keputusan ini RSUD mempunyai wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Pada tahun 2014, Pendapatan BLUD meningkat yang dikarenakan meningkatnya jumlah pasien sehingga Belanja Barang dan Jasa pada rekening Belanja Pakai Habis Kantor dan Belanja Bahan Material juga meningkat, dimana melampaui pagu anggaran yang telah dialokasikan pada awal tahun.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2014 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran dan realisasi 2014 sebagai berikut:

Belanja Hibah	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	29.652.250.000,00	12.223.966.000,00	41,22%	17.428.284.000,00
Jumlah	29.652.250.000,00	12.223.966.000,00	41,22%	17.428.284.000,00

Dari anggaran belanja hibah TA 2014 sebesar Rp29.652.250.000,00 terealisasi sebesar Rp12.223.966.000,00 atau 41,22%. Peruntukan dana Hibah untuk Tahun 2014 antara lain : pengamanan instansi vertikal, pembangunan masjid, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan operasional LPM, Biaya Operasional Sekolah (SD, SMP, SMA Swasta), Lembaga Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Pondok Pesantren, Operasional Madin, BKSM, LSM dan Organisasi Masyarakat. Penjelasan terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Sisa
	Rp	Rp	Rp
a) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	12.722.000.000,00	9.917.103.500,00	2.804.896.500,00
b) Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	16.930.250.000,00	2.306.862.500,00	14.623.387.500,00
Jumlah	29.652.250.000,00	12.223.966.000,00	17.428.284.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Akun ini menggambarkan Belanja Bantuan Sosial untuk periode TA 2014 yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	7.544.500.000,00	4.205.450.000,00	55,74%	3.339.050.000,00
Jumlah	7.544.500.000,00	4.205.450.000,00	55,74%	3.339.050.000,00

Dari anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp7.544.500.000,00 terealisasi sebesar Rp4.205.450.000,00 atau 55,74%. Peruntukan dana Bantuan Sosial Tahun 2014 antara lain : pengobatan masyarakat tidak mampu, biaya pendidikan, uang duka masyarakat, sembako, modal usaha, pengajian dan bantuan biaya hidup. Penjelasan terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Anggaran	Realisasi	Sisa
	Rp	Rp	Rp
a) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.458.250.000,00	1.185.750.000,00	1.272.500.000,00
b) Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.886.250.000,00	1.010.700.000,00	1.875.550.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial Uang Duka	2.200.000.000,00	2.009.000.000,00	191.000.000,00
Jumlah	7.544.500.000,00	4.205.450.000,00	3.339.050.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah saldo Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
Belanja Bantuan Partai Politik	667.824.473,00	643.396.802,00	96,34%	24.427.671,00
Jumlah	667.824.473,00	643.396.802,00	96,34%	24.427.671,00

Dari anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp667.824.473,00 terealisasi sebesar Rp643.396.802,00 atau 96,34%. Realisasi tersebut merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Probolinggo, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2013. Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban, pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBD. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari:

- Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
- Barang inventaris/modal atau fisik, barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala 1 (satu) tahun kepada Walikota Probolinggo setelah diperiksa oleh BPK – RI.

Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan pada Tahun Anggaran 2014 sebanyak 8 (delapan) partai politik. Penganggaran belanja dan realisasinya untuk tahap I selama 8 (delapan) bulan, dari bulan Januari s.d. Agustus 2014 berdasarkan pada hasil pemilu legislatif 2009 yang masa baktinya berakhir pada bulan Agustus 2014. Sedangkan untuk tahap II selama 4 (empat) bulan, dari bulan September s.d. Desember 2014 berdasarkan pada hasil pemilu legislatif 2014. Namun demikian, bantuan keuangan tahap II Tahun Anggaran 2014 PPP tidak dapat dicairkan karena terjadi dualisme kepengurusan.

2. Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Probolinggo meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan,



Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2014 sebagai berikut:

Belanja Modal	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Belanja Tanah	11.051.000.000,00	10.162.371.608,00	91,96%	888.628.392,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin	45.710.253.250,45	36.172.075.933,00	79,13%	9.538.177.317,45
3 Belanja Gedung dan Bangunan	45.609.796.294,54	27.558.543.703,10	60,42%	18.051.252.591,44
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.098.643.627,06	31.358.076.526,62	91,96%	2.740.567.100,44
5 Belanja Aset tetap Lainnya	4.662.127.000,00	1.475.179.468,00	31,64%	3.186.947.532,00
6 Belanja Aset Lainnya	200.000.000,00	197.110.600,00	98,56%	2.889.400,00
Jumlah Belanja Modal	141.331.820.172,05	106.923.357.838,72	75,65%	34.408.462.333,33

Dari anggaran belanja modal sebesar Rp141.331.820.172,05 terelisasi sebesarRp106.923.357.838,72 atau 75,65%. Dimana didalamnya termasuk realisasi atas seluruh biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Belanja Tidak Terduga

Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode TA 2014, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	1.031.236.512,00	22,92%	3.468.763.488,00
Jumlah	4.500.000.000,00	1.031.236.512,00	22,92%	3.468.763.488,00

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014, penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/84/KEP/425.012/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Yang Dianggarkan Dalam APBD Untuk Mendanai Kebutuhan Mendesak Dalam Rangka Pembayaran Obat Pasien Jamkesmas RSUD Dr. Mohammad saleh Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dan Nomor: 188.45/555/KEP/425.012/2014 tanggal 31Desember 2014 tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Yang Dianggarkan Dalam APBD Untuk Mendanai Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam Dan/Atau Bencana Sosial, Termasuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun – Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dimaksud telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Probolinggo sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Pimpinan DPRD Kota Probolinggo Nomor : 900/579/425.110/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Realisasi Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran 2014.



Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp1.031.236.512,00 atau 22,92% digunakan untuk pembayaran obat pasien Jamkesmas RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp2.500.000,00 digunakan untuk penanganan dapur rumah roboh di Curahgrinting. Selain itu juga digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan sebesar Rp28.736.512,00. Penerimaan tersebut adalah pembayaran PBB atas nama PG Wonolangan yang seharusnya masuk ke Rekening Kas Negara. Pengembalian atas kelebihan penerimaan dilaksanakan dengan pemindahbukuan yang seharusnya melalui mekanisme SP2D. Sehingga dibuat jurnal memorial pengeluaran kas untuk mencatat dan mengakui pengeluarannya melalui Belanja Tidak Terduga, berdasarkan:

- Nota kredit Bank Jatim No. 044 Set PBB 301213 tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp42.801.106,00. Dari jumlah tersebut seharusnya sebesar Rp28.736.512,00 merupakan pembayaran PBB atas nama PG Wonolangan, karena terjadi kesalahan transaksi masuk ke RKUD Kota Probolinggo yang seharusnya masuk ke rekening Kas Negara.
- Rekening koran Kas Umum Daerah Kota Probolinggo per 30 Desember 2013 atas diterimanya setoran PBB 301213 sebesar Rp42.801.106,00.
- Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo Nomor : 900/9156/425.110/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Pembayaran PBB atas Nama PG Wonolangan.
- Surat Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo Nomor : 052/54/PN/Cpb/2014 tanggal 8 Januari 2014 Perihal : Koreksi Kesalahan transaksi pembayaran PBB.
- Nota debit Bank Jatim No. 013 koreksi PBB PG Wonolangan 2013 tanggal 9 Januari 2014, sebesar Rp28.736.512,00.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2014 sebagai berikut:

	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 Penerimaan Pembiayaan	74.913.283.602,46	74.913.283.602,46	100,00%	0,00
2 Pengeluaran Pembiayaan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah	74.163.283.602,46	74.163.283.602,46	100,00%	0,00

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2014 sebesar Rp74.163.283.602,46 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp74.163.283.602,46. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu dan pencairan dana cadangan, dengan anggaran/realisasi TA 2014 sebagai berikut.



	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
1 SILPA Tahun Lalu	74.913.283.602,46	74.913.283.602,46	100,00%	0,00
Jumlah	74.913.283.602,46	74.913.283.602,46	100,00%	0,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2014 dari SILPA Tahun Lalu sebesar Rp74.913.283.602,46 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp74.913.283.602,46.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Pada TA 2014, Pemerintah Kota Probolinggo Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Rasio	Lebih/Kurang 2014
	Rp	Rp	%	Rp
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2014 yaitu untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp750.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. BPR Jatim. Perlu disampaikan bahwa mekanisme realisasi penyertaan modal dimaksud dilaksanakan dengan pemindahbukuan dana rekening giro Kas Umum Daerah ke rekening 0123011261 a.n. PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo. Seharusnya realisasi pembiayaan pengeluaran untuk penyertaan modal tersebut dilaksanakan dengan mekanisme SP2D. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan jurnal memorial untuk mencatat dan mengakui pemindahbukuan sebagai realisasi pembiayaan pengeluaran untuk penyertaan modal, mendasarkan bahwa:

- Surat dari Pimpinan Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo kepada Walikota Probolinggo tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 034/Um./006/2014 Perihal : Permohonan Tambahan Modal Saham.
- Penyertaan modal tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Modal Saham Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tanggal 22 Juli 2014.
- Penyertaan modal tersebut telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Disposisi Walikota Probolinggo atas Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo tanggal 14 Nopember 2014 Nomor : 900/6526/425.110/2014 Perihal : Penambahan Dana Daerah (SAHAM) yang menyetujui



penempatan dana Pemerintah Kota Probolinggo dalam bentuk saham pada Bank BPR Jatim sebesar Rp750.000.000,00.

- e. Nota kredit atas cek no. BA 339221 tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp750.000.000,00 dari rekening 0121000000 ke rekening Bank BPR Jatim dan Rekening Koran Bank Jatim tanggal 11 Nopember 2014.
- f. Surat Pimpinan Bank BPR Jatim kepada Walikota Probolinggo Nomor : 1292/Tre/2014 tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Setoran Saham Pemerintah Kota Probolinggo.

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, sebagai berikut:

	Rp	Rp	%	Rp
1. Pendapatan Daerah	833.603.523.833,37	872.815.764.197,61	104,70%	(39.212.240.364,24)
2. Belanja Daerah	907.766.807.435,83	778.254.103.607,97	85,73%	34.951.043.238,22
3. <i>Surplus (Defisit) : 1 – 2</i>	<i>(74.163.283.602,46)</i>	<i>94.561.660.589,64</i>	<i>18,97%</i>	<i>(168.724.944.192,10)</i>
4. Penerimaan Pembiayaan	74.913.283.602,46	74.913.283.602,46	100,00%	0,00
5. Pengeluaran Pembiayaan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%	0,00
6. <i>Pembiayaan Neto : 4 – 5</i>	<i>74.163.283.602,46</i>	<i>74.163.283.602,46</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
SiLPA (SiKPA) : 3+6	0,00	168.724.944.192,10	0,00%	(168.724.944.192,10)

Perhitungan APBD TA 2014 menunjukkan SiLPA sebesar Rp168.724.944.192,10, terdiri dari:

	31-Des-2014
	Rp
a) Kas di BUD	159.537.537.275,04
b) Kas di BLUD RSUD Tahun 2013	71.003.876,47
c) SiLPA BLUD RSUD Tahun 2014	7.351.001.135,59
d) SiLPA JKN Dinkes Tahun 2014	1.765.401.905,00
Jumlah	168.724.944.192,10

SiLPA sebesar Rp168.724.944.192,10, merupakan:

a. Pelampauan Penerimaan PAD	Rp 33.603.261.134,24
b. Pelampauan Dana Perimbangan	Rp 304.540.646,00
c. Pelampauan Penerimaan lain – lain Pendapatan daerah yang sah	Rp 5.304.438.584,00
d. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya	Rp 129.512.703.827,86

Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya, sebesar Rp129.512.703.827,86, berdasarkan sumber dana, adalah sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 11.109.582.365,05
b. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT)	Rp 1.346.704.279,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	Rp 2.175.395.600,00
d. Tunjangan Profesi Guru	Rp 26.247.957.300,00
e. Tambahan Penghasilan Guru	Rp 1.530.625.000,00
f. PAD, DAU, BLUD, JKN, DID, DAK TA 2013 yang dianggarkan yang dianggarkan kembali di TA 2014	Rp 87.102.439.283,81



SILPA DAK sebesar Rp11.109.582.365,05, namun demikian dari target penerimaan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp32.644.610.000,00 hanya tersalur/tertransfer sebesar Rp24.483.458.000,00 atau 75%. Pentransferan tersebut terdiri dari transfer tahap I sebesar Rp9.793.383.000,00 dan tahap II sebesar Rp14.690.075.000,00. Transfer tahap III sebesar Rp8.161.152.000,00 tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Hal ini disebabkan karena penyerapan/realisasi belanja untuk transfer tahap III tidak memenuhi persyaratan. Realisasi belanja tidak mencapai 90% dari dana yang sudah ditransfer. Persyaratan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah. Sisa dana di RKUD Kota Probolinggo sebesar Rp2.948.430.365,05. Sisa dana tersebut merupakan transfer tahap I dan tahap II dikurangi dengan akumulasi realisasi belanja tahap I dan tahap II sebesar Rp21.535.027.634,95.

SILPA Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.175.395.600,00 yang disebabkan karena tidak terlaksananya kegiatan. Ada 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp1.663.000.000,00 yang tidak terlaksana, sebagai berikut:

1. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)/BOSDA MADIN sebesar Rp1.155.000.000,00. Tidak dapat direalisasikan karena petunjuk teknis penggunaan dari Provinsi terlambat diterima.
2. BKSM jenjang SLTA sebesar Rp468.000.000,00. Tidak dapat direalisasikan karena petunjuk teknis penggunaan dari Provinsi terlambat diterima.
3. *Community College*/Akademi Komunitas sebesar Rp40.000.000,00.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 903/12.450/202/2013 Perihal : Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, apabila Kabupaten/Kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan tersebut sesuai peruntukannya, maka dana bantuan keuangan tersebut harus disetor kembali pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Probolinggo telah mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terlaksana tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp1.663.000.000,00.

SilPA merupakan hak Pemerintah Kota Probolinggo, sebagai penambah ekuitas dana daerah, yang ditunjukkan oleh adanya sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah dengani rincian sebagai berikut:

RINCIAN SALDO KAS DAERAH:		
	2014	2013
1. Sisa Kas di Bank :	11.537.537.275,04	10.355.025.237,75
a. Rekening Giro No. 0121000000	11.537.537.275,04	10.355.025.237,75
2. Sisa Kas di Rekening Deposito :	148.000.000.000,00	35.000.000.000,00
a. BNI 46 Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00
b. BANK JATIM Cabang Probolinggo	108.000.000.000,00	25.000.000.000,00
c. BRI Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00
d. BANK MANDIRI Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00
e. BANK BTN Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00
JUMLAH : 1 + 2	159.537.537.275,04	45.355.025.237,75



Data Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp159.537.275,04 dan Rp45.355.025.237,75, rekening giro dan deposito bank yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2014.

4.3. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Probolinggo TA 2014 dan 2013, terdiri atas:

Arus Kas	Tahun 2014	Tahun 2013
A. Aktivitas Operasi	191.531.999.287,77	94.498.131.520,98
B. Aktivitas Investasi	(106.086.741.738,72)	(67.510.877.032,74)
C. Aktivitas Pembiayaan	(750.000.000,00)	2.500.000.000,00
D. Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	84.695.257.549,05	29.487.254.488,24

Realisasi Arus Kas Bersih TA 2014 terjadi surplus sebesar Rp84.695.257.549,05 atau selisih surplus sebesar Rp55.208.003.060,81 jika dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp29.487.254.488,24 realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1. Arus Kas Masuk	793.059.105.363,02	643.868.526.830,67
2. Arus Kas Keluar	601.527.106.075,25	549.370.395.309,69
Arus Kas Bersih	191.531.999.287,77	94.498.131.520,98

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2014 adalah sebesar Rp191.531.999.287,77 naik sebesar Rp97.033.867.766,79 dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp94.498.131.520,98. Realisasi arus kas aktifitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah 793.059.105.363,02 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari :

	Tahun 2014	Tahun 2013
1) Pendapatan Pajak Daerah	24.457.670.693,00	20.951.122.357,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah	15.330.543.060,00	11.870.773.952,09
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	762.559.815,47	739.526.618,98
4) Lain – lain PAD yang Sah	14.755.373.484,55	6.306.599.554,60
5) Dana Bagi Hasil Pajak	32.596.477.462,00	33.289.424.471,00
6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.419.313.519,00	15.247.050.379,00
7) Dana Alokasi Umum	454.208.196.000,00	414.534.284.000,00
8) Dana Alokasi Khusus	24.483.458.000,00	32.341.470.000,00
9) Dana Otonomi Khusus	0,00	81.987.000,00
10) Dana Penyesuaian	86.059.278.000,00	58.099.963.000,00
11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Propinsi	64.595.377.329,00	43.315.480.498,00
12) Pendapatan Hibah	0,00	0,00
13) Pendapatan Lainnya	54.390.858.000,00	7.090.845.000,00
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	793.059.105.363,02	643.868.526.830,67

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp601.527.106.075,25 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

	Tahun 2014	Tahun 2013
a) Belanja Pegawai	388.352.722.352,00	348.641.961.409,60
b) Belanja Barang	195.070.334.409,25	166.739.488.116,67
c) Belanja Bunga	0,00	0,00
d) Belanja Subsidi	0,00	0,00
e) Belanja Hibah	12.223.966.000,00	22.000.794.406,42
f) Belanja Bantuan Sosial	4.205.450.000,00	10.509.120.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	643.396.802,00	622.972.777,00
h) Belanja Tidak Terduga	1.031.236.512,00	856.058.600,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	601.527.106.075,25	549.370.395.309,69

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1, Arus Kas Masuk	0,00	4.033.000,00
2. Arus Kas Keluar	106.086.741.738,72	67.514.910.032,74
Arus Kas Bersih	(106.086.741.738,72)	(67.510.877.032,74)



Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2014 dan TA 2013 terjadi defisit sebesar sebesar Rp106.086.741.738,72 dan Rp67.510.877.032,74

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2014 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada Pemerintah Kota Probolinggo.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan rincian, sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
a) Belanja Tanah	10.162.371.608,00	384.063.000,00
b) Belanja Peralatan & Mesin	35.372.906.633,00	21.985.551.699,18
c) Belanja Gedung & Bangunan	27.528.543.703,10	25.545.761.877,01
d) Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	31.350.629.726,62	18.289.865.589,55
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	1.475.179.468,00	489.066.117,00
f) Belanja Aset Lainnya	197.110.600,00	820.601.750,00
Jumlah	106.086.741.738,72	67.514.910.032,74

C. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1. Arus Kas Masuk	0,00	2.500.000.000,00
2. Arus Kas Keluar	750.000.000,00	0,00
Arus Kas bersih	(750.000.000,00)	2.500.000.000,00

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2014 adalah defisit sebesar Rp750.000.000,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Pada tahun 2014 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan pada Pemerintah Kota Probolinggo.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasi pada Arus kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. BPR Jatim. Perlu disampaikan bahwa mekanisme realisasi penyertaan modal dimaksud dilaksanakan dengan pemindah bukuan dana rekening giro Kas Umum Daerah ke rekening 0123011261 a.n. PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo. Seharusnya realisasi pembiayaan pengeluaran untuk penyertaan modal tersebut dilaksanakan dengan mekanisme SP2D. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan jurnal memo untuk mencatat dan mengakui pemindah bukuan sebagai realisasi pembiayaan pengeluaran untuk penyertaan modal mendasarkan bahwa:

- Surat dari Pimpinan Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo kepada Walikota Probolinggo tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 034/Um./006/2014 Perihal : Permohonan Tambahan Modal Saham.



- b. Penyertaan modal tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Modal Saham Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tanggal 22 Juli 2014.
- c. Penyertaan modal tersebut telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- d. Disposisi Walikota Probolinggo atas Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo tanggal 14 Nopember 2014 Nomor : 900/6526/425.110/2014 Perihal : Penambahan Dana Daerah (SAHAM) yang menyetujui penempatan dana Pemerintah Kota Probolinggo dalam bentuk saham pada Bank BPR Jatim sebesar Rp750.000.000,00.
- e. Nota kredit atas cek no. BA 339221 tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp750.000.000,00 dari rekening 0121000000 ke rekening Bank BPR Jatim dan Rekening Koran Bank Jatim tanggal 11 Nopember 2014.
- f. Surat Pimpinan Bank BPR Jatim kepada Walikota Probolinggo Nomor : 1292/Tre/2014 tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Setoran Saham Pemerintah Kota Probolinggo.

D. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, dan dapat disajikan sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1. Arus Kas Masuk	70.534.392.814,00	52.717.875.531,33
2. Arus Kas Keluar	70.534.392.814,00	52.717.875.531,33
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
a). Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.602.544.939,00	44.542.875.531,33
b). Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	16.931.847.875,00	8.175.000.000,00
Arus Kas Masuk	70.534.392.814,00	52.717.875.531,33

a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp53.602.544.939,00, terdiri dari :

	Tahun 2014	Tahun 2013
1) PPN	12.686.547.424,00	9.943.919.643,87
2) PPh Pasal 21	13.919.327.415,00	11.381.976.797,80
3) PPh Pasal 22	1.264.226.489,00	772.903.870,00
4) PPh Pasal 23	465.858.442,00	1.044.497.005,66
5) PPh Final Pasal 4	1.090.142.101,00	245.189.626,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

6)	TASPEN	18.297.092.687,00	17.301.044.408,00
7)	BPJS / ASKES	5.493.929.381,00	3.464.074.180,00
8)	TAPERUM	385.421.000,00	389.270.000,00
	Jumlah	53.602.544.939,00	44.542.875.531,33

- b) Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) sebesar Rp16.931.847.875,00 terdiri atas :

	Tahun 2014	Tahun 2013
1) Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan	772.556.105,00	1.584.999.375,00
2) Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan	54.217.705,00	0,00
3) Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan	9.052.443.895,00	6.590.000.625,00
4) Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan	7.052.630.170,00	0,00
Jumlah	16.931.847.875,00	8.175.000.000,00

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Realisasi kas keluar dari aktivitas non anggaran yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Adapun nilainya sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
a). Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.602.544.939,00	44.542.875.531,33
b). Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	16.931.847.875,00	8.175.000.000,00
Arus Kas Masuk	70.534.392.814,00	52.717.875.531,33

- a. Pengeluaran PFK sebesar Rp53.602.544.939,00 terdiri dari:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1) PPN	12.686.547.424,00	9.943.919.643,87
2) PPh Pasal 21	13.919.327.415,00	11.381.976.797,80
3) PPh Pasal 22	1.264.226.489,00	772.903.870,00
4) PPh Pasal 23	465.858.442,00	1.044.497.005,66
5) PPh Final Pasal 4	1.090.142.101,00	245.189.626,00
6) TASPEN	18.297.092.687,00	17.301.044.408,00
7) BPJS / ASKES	5.493.929.381,00	3.464.074.180,00
8) TAPERUM	385.421.000,00	389.270.000,00
Jumlah	53.602.544.939,00	44.542.875.531,33

- b. Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) sebesar Rp16.931.847.875,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor :188.45/2/KEP/425.012/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Uang Persediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014, terdiri atas:

	Tahun 2014
1) Dinas Pendidikan	350.000.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Tahun 2014
2) Dinas Kesehatan	350.000.000,00
3) Rumah Sakit Umum Daerah	0,00
4) Dinas Pekerjaan Umum	350.000.000,00
5) BAPPEDA	350.000.000,00
6) Dinas Perhubungan	300.000.000,00
7) Badan Lingkungan Hidup	350.000.000,00
8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.000.000,00
9) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	250.000.000,00
10) Dinas Sosial	250.000.000,00
11) Dinas Tenaga Kerja	250.000.000,00
12) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan	250.000.000,00
13) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	150.000.000,00
14) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	350.000.000,00
15) Badan Kesbang, Politik, dan Linmas	175.000.000,00
16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00
17) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	150.000.000,00
18) Bagian Umum	350.000.000,00
19) Bagian Organisasi	125.000.000,00
20) Bagian Pemerintahan	150.000.000,00
21) Bagian Hukum	125.000.000,00
22) Bagian Humas dan Protokol	300.000.000,00
23) Bagian Kesejahteraan Rakyat	125.000.000,00
24) Bagian Administrasi Perekonomian	150.000.000,00
25) Bagian Administrasi Pembangunan	150.000.000,00
26) Sekretariat DPRD	350.000.000,00
27) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	350.000.000,00
28) Badan Kepegawaian Daerah	350.000.000,00
29) Inspektorat	175.000.000,00
30) Sekretariat KORPRI	50.000.000,00
31) Kecamatan Wonoasih	300.000.000,00
32) Kecamatan Kademangan	300.000.000,00
33) Kecamatan Mayangan	300.000.000,00
34) Kecamatan Kedopak	300.000.000,00
35) Kecamatan Kanigaran	300.000.000,00
36) Dinas Komunikasi dan Informasi	300.000.000,00
37) Kantor Pemberdayaan Masyarakat	300.000.000,00
38) Kantor Perpustakaan dan Arsip	100.000.000,00
39) Dinas Pertanian	350.000.000,00
40) Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00
Jumlah	9.825.000.000,00

2) Pemberian Tambahan Uang kepada SKPD, terdiri atas:

	Tahun 2014
1) Dinas Pendidikan	1.707.145.920,00
2) Kecamatan Wonoasih	1.116.592.550,00
3) Kecamatan Kademangan	1.122.638.600,00
4) Kecamatan Mayangan	908.308.945,00
5) Kecamatan Kedopak	1.125.822.960,00



6) Kecamatan Kanigaran

1.126.338.900,00

Jumlah**7.106.847.875,00****E. SALDO AKHIR KAS**

Saldo akhir Kas sebesar Rp168.758.862.514,29 merupakan jumlah keseluruhan kas di BUD per 31 Desember 2014. Saldo Kas di BUD pada akhir TA 2014 dan 2013 tersebut berada dalam penguasaan BUD dan Bendahara SKPD baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dengan rincian, sebagai berikut:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1 Kas di Kas Daerah	159.537.537.275,04	74.842.279.725,99
2 Kas di Bendahara Penerimaan	33.918.322,19	114.068.500,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4 Kas di Rekening FKTP	1.765.401.905,00	0,00
5 Kas di BLUD RSUD	7.422.005.012,06	71.003.876,47
JUMLAH	168.758.862.514,29	75.027.352.102,46

RINCIAN KAS di KAS DAERAH:

	Tahun 2014	Tahun 2013
1. Sisa Kas di Bank :	11.537.537.275,04	6.842.279.725,99
a. Rekening Giro No. 0121000000	11.537.537.275,04	6.842.279.725,99
2. Sisa Kas di Rekening Deposito :	148.000.000.000,00	68.000.000.000,00
a. BNI 46 Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
b. BANK JATIM Cabang Probolinggo	108.000.000.000,00	50.000.000.000,00
c. BRI Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00
d. BANK MANDIRI Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00
e. BANK BTN Cabang Probolinggo	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00
JUMLAH : 1 + 2	159.537.537.275,04	74.842.279.725,99

**BAB V**
PENUTUP

Mendasarkan uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dari BAB I sampai dengan BAB IV dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun Neraca Awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan Neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan Laporan Keuangan tahun-tahun berikutnya.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
5. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:

a. Target Pendapatan APBD, sebesar	Rp	833.603.523.833,37
b. Realisasi Pendapatan APBD, sebesar	Rp	872.815.764.197,61
c. Selisih Lebih Pendapatan APBD,sebesar	Rp	39.212.240.364,24
6. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja APBD, sebesar	Rp	907.766.807.435,83
b. Realisasi Belanja APBD,sebesar	Rp	778.254.103.607,97
c. Kurang Belanja APBD,sebesar	Rp	129.512.703.827,86
7. Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai, sebesar	Rp	422.615.706.461,00
b. Belanja Barang dan Jasa, sebesar	Rp	230.610.989.994,25
c. Belanja Modal, sebesar	Rp	106.923.357.838,72
d. Belanja Hibah, sebesar	Rp	12.223.966.000,00
e. Belanja Bantuan,sebesar	Rp	4.205.450.000,00
f. Belanja Bantuan,sebesar	Rp	643.396.802,00
g. Belanja Tak Terduga,sebesar	Rp	1.031.236.512,00
8. Surplus pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp94.561.660.589,64 adalah realisasi pendapatan Rp872.815.764.197,61 dikurangi dengan realisasi belanja Rp778.254.103.607,97.



9. Pembiayaan Tahun Anggaran 2014, terdiri atas:

– Penerimaan Pembiayaan, sebesar	Rp	74.913.283.602,46
– Pengeluaran Pembiayaan, sebesar	Rp	750.000.000,00
– Pembiayaan netto, sebesar	Rp	74.163.283.602,46

10. Saldo anggaran lebih awal tahun 2014 Rp74.913.283.602,46 dan saldo anggaran lebih akhir tahun 2014 Rp168.724.944.192,10.

11. Total Aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2014 sebesar Rp1.799.891.371.872,66, terdiri dari:

– Aset Lancar	Rp	194.851.996.960,55
– Investasi Jangka Panjang	Rp	14.034.247.117,67
– Aset Tetap	Rp	1.577.355.824.313,44
– Aset Lainnya	Rp	13.757.703.481,00

12. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2014 Rp3.725.856.543,91, terdiri atas:

– Kewajiban jangka pendek	Rp	5.495.373.568,91
– Kewajiban jangka panjang	Rp	0,00

13. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2014 Rp1.796.165.515.328,75, terdiri atas:

– Ekuitas Dana Lancar	Rp	189.356.623.391,64
– Ekuitas Dana Investasi	Rp	1.605.147.774.912,11
– Ekuitas Dana Cadangan	Rp	0,00

14. Arus Kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2014, terdiri atas:

– Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	191.531.999.287,77
– Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(106.086.741.738,72)
– Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(750.000.000,00)
– Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
– Saldo Akhir Kas Tahun 2014	Rp	168.758.862.514,29

Probolinggo, Juni 2015
WALIKOTA PROBOLINGGO

Hj. RUKMINI, SH., M.Si.